



**PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2018**

MARET, 2019



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2018. Oleh karena itu, laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi pada Tahun 2018. Selanjutnya, laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan profesional.

Akhirnya, laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, 25 Maret 2019
Bupati Lombok Tengah,

H. MOH. SUHAILI FT, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	I.1
I.1 Latar Belakang	I.1
I.2 Dasar Hukum	I.1
I.3 Gambaran Umum Kondisi Daerah	I.3
I.4 Organisasi	I.8
I.5 Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis Kabupaten	I.12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II.1
II.1 Visi dan Misi Pemerintah Kab. Lombok Tengah	II.1
II.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	II.4
II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	II.16
II.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018	II.16
II.5 Metode Pengumpulan Data Kinerja	II.21
II.6 Prosedur Penyesuaian LKjIP	II.22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III.1
III.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kab.Lombok Tengah Tahun 2018	III.1
III.1.1. Sasaran 1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif III.6
III.1.2. Sasaran 2	Terbinanya PMKS secara berkelanjutan III.10
III.1.3. Sasaran 3	Terwujudnya Metode Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Berbangsa, Bernegara Dan Bermasyarakat Yang Efektif III.11
III.1.4. Sasaran 4	Terwujudnya Sistem Layanan Kesehatan Yang Baik III.13
III.1.5. Sasaran 5	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Dasar Yang Memadai III.14
III.1.6. Sasaran 6	Tersedianya lapangan pekerjaan baru III.16
III.1.7. Sasaran 7	Tersedianya Jalan Dalam Kondisi Yang Mantap III.18

III.1.8. Sasaran 8	Tersedianya sarana dan prasarana utilitas perkotaan	III.19
III.1.9. Sasaran 9	Menurunnya luasan kawasan kumuh	III.20
III.1.10. Sasaran 10	Tercegahnya semakin menurunnya daya dukung lingkungan	III.21
III.1.11. Sasaran 11	Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Terhadap Dokumen Kependudukan	III.23
III.1.12. Sasaran 12	Terwujudnya pengendalian jumlah penduduk	III.25
III.1.13. Sasaran 13	Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan Pertama	III.26
III.1.14. Sasaran 14	Terwujudnya Koperasi yang berkualitas	III.27
III.1.15. Sasaran 15	Tersedianya SDM UMKM dan aparatur yang berkompeten	III.28
III.1.16. Sasaran 16	Tersedianya teknologi pertanian	III.29
III.1.17. Sasaran 17	Terwujudnya Pola Konsumsi Pangan Yang Beragam	III.30
III.1.18. Sasaran 18	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pariwisata Yang Memadai	III.31
III.1.19. Sasaran 19	Terwujudnya Peningkatan Produksi Perikanan	III.33
III.1.20. Sasaran 20	Tersedianya sarana prasarana IKM yang memadai	III.35
III.1.21. Sasaran 21	Terwujudnya kapasitas keuangan daerah yang memadai	III.36
III.2. Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan		III.38
III.3. Kinerja lainnya		III.70
BAB IV PENUTUP		IV.1
LAMPIRAN		

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit tentang keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Laporan ini berisi perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan. Oleh karena itu, laporan diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh atas capaian kinerja serta upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari indikator kinerja utama yang telah ditentukan.

Pada Tahun 2018, terdapat 18 (delapan belas) tujuan strategis dan 21 (Dua Puluh Satu) sasaran strategis dan dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 adalah 115 %. Jika pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 dapat dinilai "SANGAT BAIK".

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan masukan/ perbaikan sebagai upaya optimalisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pencapaian visi Kabupaten Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan bermutu ("BERSATU").

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKj-IP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan LKJ-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKJ-IP juga disusun dengan tujuan menciptakan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, serta mewujudkan perbaikan dan pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

I.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang – Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Keputusan Kepala LAN No 239 / IX / 6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
 17. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
-

I.3. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Lombok Tengah terletak diantara 116°05' - 116°24' Bujur Timur dan 8°24' - 8°57' Lintang Selatan, luas wilayah 1.208,39 km² (1.208.390 Ha), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur.

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 terdiri 12 kecamatan, 127 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah dusun 1.474 dusun dan 66 lingkungan seperti tertera pada tabel berikut ini.

Tabel I.1
Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 s.d 2018

Kecamatan	Desa			Kelurahan			Dusun			Lingkungan		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1. Praya Barat	10	10	10	-			134	138	140	-		
2. Praya Barat Daya	11	11	11	-			121	128	123	-		
3. Pujut	16	16	16	-			262	269	281	-		
4. Praya Timur	10	10	10	-			183	181	181	-		
5. Janapria	12	12	12	-			217	203	203	-		
6. Kopang	11	11	11	-			116	120	115	-		
7. Praya	6	6	6	9	9	9	82	83	105	50	50	50
8. Praya	9	9	9	3	3	3	110	108	107	16	16	16
9. Jonggat	13	13	13	-			135	135	142	-		
10. Pringgarata	11	11	11	-			114	113	112	-		
11. Batukliang	10	10	10	-			144	140	145	-		
12. Batukliang Utara	8	8	8	-			91	82	90	-		
Jumlah/Total	127	127	127	12	12	12	1.709	1474	1744	66	66	

Sumber: Data Jumlah Dusun/ Lingkungan Kab. Lombok Tengah Tahun 2018 (DPMD Kab. Lombok Tengah)

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Lombok Tengah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

- Bagian Utara

Wilayah ini meliputi Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Kopang, Kecamatan Pringgarata dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan dataran tinggi karena merupakan bagian dari kaki Gunung Rinjani (3.726 m). Curah hujan di wilayah ini relatif tinggi sehingga sangat sesuai untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan). Wilayah ini juga merupakan kawasan hutan lindung Kabupaten Lombok Tengah serta sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata (wisata alam dan wisata budaya).

- Bagian Tengah

Wilayah ini meliputi Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Janapria, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan daerah dataran rendah. Potensi yang dimiliki antara lain adalah pertanian padi dan palawija, yang didukung oleh lahan persawahan yang luas dan sarana irigasi yang memadai.

- Bagian Selatan

Wilayah ini meliputi Kecamatan Pujut, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, serta sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat. Sebagian besar wilayah ini berupa daerah perbukitan dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan pengembangan pariwisata yang didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Lombok.

2. Gambaran Umum Demografis

Kondisi demografis Kabupaten Lombok Tengah dalam laporan ini akan digambarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018

berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten Lombok Tengah adalah **1.040.594** jiwa yang terdiri dari **518.390** jiwa penduduk laki-laki dan **522.204** jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km2, maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 861,14 jiwa/km².

Secara lebih rinci data jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :

Tabel I.2`
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 s.d 2018

No	Kecamatan	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Praya	69,498	59.150	60.839	63.238	69,614	59.165	61.032	63.843	139,112	118.315	121.871	127.081
2	Jonggat	54,926	48.047	48.620	53.795	54,899	47.928	48.484	54.129	109,825	95.975	97.104	107.924
3	Batukliang	45,323	39.489	41.737	44.040	45,130	39.622	41.723	43.886	90,453	79.111	83.460	87.926
4	Pujut	60,975	56.008	57.720	57.644	61,402	56.657	58.492	58.511	122,377	112.665	116.212	116.155
5	Praya Barat	37,700	42.042	41.691	40.419	38,493	42.854	42.403	41.054	76,193	84.896	84.094	81.473
6	Praya Timur	34,107	37.586	37.078	36.554	34,722	38.204	37.790	37.076	68,829	75.790	74.868	73.630
7	Janapria	37,657	43.621	43.413	42.516	38,418	43.721	43.708	42.396	76,075	87.342	87.121	84.912
8	Pringgarata	36,991	39.428	38.838	38.311	36,479	38.942	38.130	38.111	73,470	78.370	76.968	76.422
9	Kopang	44,302	48.016	47.211	46.230	45,366	48.823	47.942	46.728	89,668	96.839	95.153	92.958
10	Praya Tengah	34,864	37.867	37.017	36.723	35,511	38.262	37.272	36.972	70,375	76.129	74.289	73.695
11	Praya Barat Daya	26,304	29.094	28.771	28.513	26,993	29.751	29.372	29.102	53,297	58.845	58.143	57.615
12	Batukliang Utara	29,697	32.623	32.210	30.407	29,475	32.270	32.126	30.396	59,172	64.893	64.336	60.803
Jumlah		512,344	512.971	515.145	518.390	516,502	516.199	518.474	522.204	1,028,846	1.029.170	1.033.619	1.040.594

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

Pada Tabel I.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan data Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2018, penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Praya yakni sebanyak 121.871 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya dengan jumlah penduduk sebanyak 57.615 jiwa. Kondisi demografi berupa kepadatan, sebaran serta komposisi penduduk merupakan salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel I.3`
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 s.d 2018

No	Kecamatan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Praya	44,848	33.551	39.258	39.302
2	Jonggat	36,285	28.787	32.073	34.677
3	Batukliang	30,036	22.923	27.489	28.209
4	Pujut	38,142	31.937	36.049	35.766
5	Praya Barat	24,197	24.713	26.693	25.308
6	Praya Timur	23,338	23.409	24.941	23.711
7	Janapria	26,952	26.935	29.399	27.515
8	Pringgarata	23,869	23.769	25.121	23.898
9	Kopang	29,449	29.022	30.907	29.093
10	Praya Tengah	23,273	22.836	24.134	23.165
11	Praya Barat Daya	18,292	17.938	19.480	18.678
12	Batukliang Utara	19,926	19.652	21.083	19.168
Jumlah		338,607	305.472	336.627	328.490

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

Pada Tabel I.3 diketahui bahwa berdasarkan data Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2018, diketahui bahwa jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Praya sebesar 39.302 kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak 18.678 kepala keluarga.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I.4
Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016 s.d 2018

N o	Kelompok Umur	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	00 - 04	24.255	33.104	34.284	22.290	30.640	31.478	46.545	63.744	65.762
2	05 – 09	47.197	49.997	50.262	44.805	47.602	47.658	92.002	97.599	97.920
3	10-14	45.729	47.348	45.104	43.022	44.588	42.617	88.751	91.936	87.721
4	15 – 19	45.262	45.861	44.403	43.767	44.490	43.413	89.029	90.351	87.816
5	20 – 24	46.113	45.191	42.630	45.601	45.218	42.885	91.714	90.409	85.515
6	25 – 29	48.299	47.554	45.868	52.848	50.532	49.265	101.14 ₇	98.086	95.133
7	30 – 34	47.970	46.789	46.420	52.859	50.768	50.111	100.82 ₉	97.557	96.531
8	35 – 39	44.725	43.549	45.280	49.243	47.669	49.252	93.968	91.218	94.532
9	40 – 44	38.533	38.091	38.971	38.207	38.538	39.289	76.740	76.629	78.260
10	45 – 49	35.470	33.931	35.092	36.490	34.577	35.019	71.960	68.508	70.111
11	50 – 54	24.146	23.613	24.668	25.010	25.361	26.593	49.156	48.974	51.261
12	55 – 59	23.557	21.305	22.018	23.407	21.689	22.553	46.964	42.994	44.571
13	60 – 64	13.912	14.462	15.503	13.631	14.734	15.840	27.543	29.196	31.343
14	65 – 69	13.040	11.080	11.750	12.227	10.574	11.462	25.267	21.654	23.212
15	70 – 74	7.246	6.941	7.912	6.390	6.480	7.521	13.636	13.421	15.433
16	75+	7.517	6.329	8.225	6.402	5.014	7.248	13.919	11.343	15.473
Jumlah		512.971	515.145	518.390	516.199	518.474	522.204	1.029.170	1.033.619	1.040.594

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

Pada Tabel I.4 dapat dicermati sebaran jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur. Hal tersebut penting untuk mengetahui komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terutama penduduk usia produktif (15-60 tahun), jumlah balita dan anak-anak serta jumlah penduduk usia lanjut yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Secara umum, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar dengan komposisi sex ratio perempuan yang lebih tinggi. Kondisi demografi dengan komposisi usia ini akan menjadi modal pembangunan yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di lain pihak, jika komposisi penduduk ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

I.4. ORGANISASI

I.4.1. Kelembagaan

Tugas dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Secara teknis fungsional dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Pembentukan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Daerah Nomor 2.b. Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

Berikut kami sampaikan perincian OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2018:

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE
PENUNJANG		
1	SEKRETARIAT DAERAH	A
2	SEKRETARIAT DPRD	A
3	INSPEKTORAT	A
DINAS DAERAH		
1	DINAS PENDIDIKAN	A
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	C
3	DINAS KESEHATAN	A
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	A
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	B
6	DINAS SOSIAL	B
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	B
8	DINAS PERHUBUNGAN	C
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	B
10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	A
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	B
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	B
13	DINAS PERTANIAN	A
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	B
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	A

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	C
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	B
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	B
19	DINAS KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	C
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	C
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	B
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	B

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE
BADAN DAERAH		
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	B
2	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	A
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	A
4	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	B
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	B
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	B
KECAMATAN		
1	PRAYA	A
2	PRAYA TENGAH	A
3	PRAYA BARAT	A
4	PRAYA BARAT DAYA	A
5	PRAYA TIMUR	A
6	PUJUT	A
7	JANAPRIA	A
8	KOPANG	A
9	BATUKLIANG	A
10	BATUKLIANG UTARA	A
11	PRINGGARATA	A
12	JONGGAT	A

I.4.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia (ASN) merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi ASN (Kuantitas dan kualitas) akan menentukan pelaksanaan birokrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Gambaran umum tentang SDM di pemerintahan Lombok Tengah kami sampaikan dalam tabel berikut:

Tabel I.5
Kondisi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

N O	UNIT KERJA	JUMLAH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JENIS KELAMIN	
							L	P
1	SEKRETARIAT DAERAH	159	11	51	74	23	122	37
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	53	0	29	19	5	40	13
3	INSPEKTORAT	71	0	9	40	22	47	24
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	89	3	55	26	5	84	5
5	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)	52	2	17	29	4	35	17
6	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI	25	0	7	14	4	19	6
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	62	3	42	13	4	57	5
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)	69	0	19	42	8	30	39
9	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	136	5	75	48	8	103	33
10	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	52	1	13	29	9	31	21
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	41	1	11	21	8	31	10
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	53	2	10	36	5	40	13
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	26	1	9	11	5	18	8
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	37	0	11	22	4	18	19
15	DINAS KESEHATAN	976	5	236	664	71	411	565
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	23	0	5	13	5	15	8
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30	0	7	20	3	24	6
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	35	1	8	21	5	24	11
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	73	30	13	24	6	61	12
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	67	16	26	22	3	59	8
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	283	36	181	64	2	237	46

N O	UNIT KERJA	JUMLAH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JENIS KELAMIN	
							L	P
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (P3AP2KB)	61	0	14	42	5	42	19
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	33	0	6	22	5	19	14
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	44	6	12	20	6	29	15
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	25	1	9	12	3	15	10
26	DINAS PERTANIAN	309	6	97	158	48	223	86
27	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50	1	20	26	3	35	15
28	DINAS SOSIAL	31	0	7	19	5	21	10
29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	52	0	5	38	9	38	14
30	DINAS PERHUBUNGAN	46	1	17	24	4	40	6
31	DINAS PENDIDIKAN	4553	14	639	1694	2206	2596	1957
32	KECAMATAN BATUKLIANG UTARA	17	1	3	12	1	17	0
33	KECAMATAN BATUKLIANG	19	0	7	11	1	14	5
34	KECAMATAN JANAPRIA	21	0	10	9	2	18	3
35	KECAMATAN KOPANG	17	0	7	9	1	11	6
36	KECAMATAN JONGGAT	28	1	11	14	2	26	2
37	KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA	19	0	8	10	1	18	1
38	KECAMATAN PRAYA BARAT	20	0	9	10	1	13	7
39	KECAMATAN PRAYA TENGAH	43	2	18	21	2	38	5
40	KECAMATAN PRAYA TIMUR	22	0	8	12	2	18	4
41	KECAMATAN PRAYA	80	0	25	54	1	56	24
42	KECAMATAN PRINGGARATA	18	0	6	10	2	14	4
43	KECAMATAN PUJUT	27	0	12	13	2	24	3

N O	UNIT KERJA	JUMLAH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JENIS KELAMIN	
							L	P
44	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	348	5	64	235	44	132	216
45	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5	0	3	2	0	4	1
JUMLAH		8300	155	1851	3729	2565	4967	3333

Sumber: BKPP Kab. Lombok Tengah, Kondisi per 31 Desember 2018

I.5. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN

I.5.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan pada Tahun 2018 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Bab II halaman 33 sebagai berikut:

a. Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a) Tingginya angka buta huruf;
- b) Kurangnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas;
- c) Masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- d) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan kependidikan, yang disertai distribusinya yang belum merata;
- e) Implementasi regulasi pendidikan belum optimal;
- f) Rendahnya minat baca masyarakat.

2. Urusan Kesehatan

- a) Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan;
- b) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan pada semua tingkat layanan;
- c) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan pada semua tingkat layanan;
- d) Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah.

3. *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

- a. Masih ada ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap
- b. Perawatan jalan kurang optimal
- c. Masih kurangnya tenaga teknis kebinamargaan
- d. Kurangnya cakupan dan kualitas Pelayanan irigasi;
- e. Menurunnya fungsi jaringan irigasi;
- f. Terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan utama irigasi dan prasarana pendukungnya;
- g. Masih lemahnya koordinasi pengelolaan irigasi antar kewenangan (Pusat, provinsi dan kabupaten);
- h. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi kurang optimal;
- i. Belum optimalnya fungsi pengendalian dan penataan ruang;
- j. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang;
- k. Kurangnya regulasi penataan ruang.

4. *Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*

- a. Masih kurangnya cakupan pelayanan air bersih dan air minum
- b. Masih rendahnya kualitas sanitasi (drainase, limbah, sampah,) di tingkat rumah tangga dan komunal
- c. Kurangnya cakupan dan pengelolaan pelayanan persampahan.
- d. Masih terbatasnya prasarana penerangan jalan,
- e. Kurangnya cakupan pelayanan listrik dan air bersih.
- f. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni.

5. *Sosial*

- a. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. Tumpang tindihnya bantuan sosial bagi PMKS;
- c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan sosial;
- d. Pergeseran sistem nilai dan norma sosial dalam masyarakat

b. *Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar*

1. *Tenaga Kerja*

- a. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja;
- b. Kualitas tenaga kerja masih belum memadai;
- c. Pemberdayaan terhadap eks-buruh migran masih rendah

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya pengarusutamaan gender
- b. Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Pangan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan lahan terutama pada lahan kritis;
- b. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- c. Menurunnya kualitas infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi maupun jalan produksi/jalan usaha tani;
- d. Meningkatnya gangguan iklim dan hama penyakit tanaman maupun ternak.
- e. Masih rendahnya profesionalitas penyuluh.
- f. Rendahnya diversifikasi pangan
- g. Belum banyak petani yang melaksanakan sistem tunda jual

4. Lingkungan Hidup

- a. Belum optimalnya upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan yang memiliki potensi air permukaan;
- b. Semakin meningkatnya ancaman efek gas rumah kaca.
- c. Belum terarahnya upaya adaptasi dan mitigasi efek gas rumah kaca (energi dan transportasi, industri, limbah, pertanian dan kehutanan)
- d. Belum efektifnya upaya perlindungan dan konservasi sumber mata air di luar kawasan hutan.
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah dan limbah.
- f. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (reduce-Reuse-Recycle).
- g. Masih rendahnya pemahaman dunia usaha dan masyarakat usaha dalam memenuhi perizinan lingkungan dan upaya tindak lanjut penanganan pencemaran lingkungan.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Masih belum optimalnya pelaksanaan layanan Administrasi Kependudukan;
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk dan melaporkan perubahan atas peristiwa penting yang dialaminya.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Terbatasnya kapasitas perangkat desa;
- b. Belum optimalnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan;
- c. Rendahnya Pendapatan Asli Desa;
- d. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Usia kawin muda dan jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin menunda kehamilan masih tinggi;
- b. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang;
- c. Kurangnya tenaga penyuluh KB;

8. Perhubungan

- a. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana keselamatan jalan;
- b. Belum optimalnya penataan jalur/izin trayek dan moda angkutan darat;
- c. Belum optimalnya operasional pemantauan trayek, pelaksanaan OPGAB (mobil patroli),
- d. Belum tersedianya operasional/anggaran untuk pemantauan angkutan orang, barang dan kendaraan tidak bermotor
- e. Belum tersedianya regulasi trayek khusus untuk angkutan barang
- f. Masih terbatasnya sarana operasional Pengawasan Jalan, rambu-rambu keselamatan jalan
- g. Belum berjalannya management/rekayasa lalulintas (tatralok)
- h. Masih minimnya PPNS dan perlengkapan operasional personil
- i. Kurang berfungsinya terminal
- j. Belum maksimalnya pengelolaan parkir
- k. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM
- l. Belum maksimalnya fasilitas uji kendaraan bermotor .

9. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum adanya sarana operasional untuk penertiban
- b. Masih ada beberapa wilayah yang belum terlayani sinyal telekomunikasi (blangspot area)
- c. Masih kurangnya koordinasi dengan pihak provinsi, kementrian pusat
- d. Masih kurangnya pemantauan gelombang radio.

10.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Koperasi belum dikelola secara profesional ;
- b. Kompetensi (inovasi, kreatifitas dan kewirausahaan) pengelola Koperasi dan pengusaha UMKM masih rendah;
- c. Masih lemahnya kerjasama dan networking antar pelaku Koperasi dan UMKM serta penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar;
- d. Masih rendahnya akses KUKM kepada permodalan dan pasar;

11.Penanaman Modal

- a. Kurangnya regulasi investasi daerah;
- b. Investasi yang ada masih belum mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung investasi
- d. Data dan Peta Investasi Daerah masih kurang.
- e. Kapasitas SDM belum memadai.

12.Kepemudaan dan Olahraga

- a. Kurangnya sarana dan prasarana publik untuk memperluas budaya olahraga prestasi di kalangan masyarakat;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan;
- c. Belum optimalnya peran kelembagaan pemuda yang sudah terbentuk

Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya pengelolaan potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- b. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat;
- c. Kurang memadainya sarana penangkapan ikan dan sarana budidaya perikanan;
- d. Rendahnya kapasitas SDM/masyarakat pesisir dan nelayan.

2. Pariwisata

- a. Rendahnya pengelolaan dan keamanan Objek Pariwisata;
- b. Kurangnya infrastruktur dasar pariwisata;
- c. Belum optimalnya promosi wisata;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata;
- e. Belum optimalnya keterkaitan pengembangan sektor pariwisata dengan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian, usaha kecil menengah, budaya dan lain-lain.

3. Kehutanan

- a. Terjadinya gangguan keamanan hutan dan pelestarian sumberdaya alam akibat tekanan masyarakat sekitar hutan;
- b. Terjadinya konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman dan lahan kering;
- c. Terancamnya luas hutan yang berfungsi sebagai penyangga iklim dan tata air bagi ekosistem;
- d. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (HTR dan HKM) masih belum optimal.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air maupun energi baru dan terbarukan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. Pengelolaan eksploitasi bahan galian masih belum ramah lingkungan.
- c. Masih lemahnya koordinasi penertiban galian tambang
- d. Masih kurangnya pendataan terkait potensi geologi

5. Perdagangan dan Perindustrian

- a. Daya Saing Industri dan Perdagangan masih rendah;
- b. Iklim berusaha masih belum kondusif;
- c. Kualitas Manajemen, wawasan dan pola pikir pengusaha lokal masih rendah.
- d. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan.

6. Transmigrasi

- a. Minimnya kuota transmigrasi baik antar daerah maupun dalam daerah;
- b. Rendahnya kapasitas calon transmigran.

Urusan Pemerintahan Umum

- a) Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan daerah atau nasional yang dapat mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan, kesadaran hukum dan politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat;
- b) Belum berjalannya penanganan bencana alam yang lebih responsif baik melalui mitigasi (pengurangan dampak) bencana dan penanganan bencana yang lebih responsif dan terpadu
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan
- d) Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam
- e) Peningkatan Iklim Usaha dan Investasi
- f) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar
- g) Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Publik

I.5.1. Isu-Isu Strategis

A. BIDANG SOSIAL, PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

- 1. Angka kriminalitas dan potensi konflik sosial relatif masih tinggi
- 2. Cakupan layanan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) masih kurang
- 3. Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi
- 4. Usia Pernikahan Pertama Perempuan relatif masih rendah
- 5. Akses dan kualitas layanan kesehatan relatif masih rendah
- 6. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak relatif masih tinggi
- 7. Akses dan kualitas layanan pendidikan relatif masih rendah
- 8. Prestasi Pemuda dan Olahraga relatif masih kurang
- 9. Minat baca masyarakat relatif masih rendah

B. BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Kurangnya sosialisasi dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.
2. Peningkatan umur rencana jalan dan infrastruktur lainnya
3. Penyediaan fasilitas penerangan jalan umum
4. Masih kurangnya dukungan layanan irigasi terhadap pertanian
5. Terbatasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni.
6. Layanan persampahan belum optimal
7. Masih ada kawasan yang tidak terlayani air bersih.
8. Belum berjalannya layanan perhubungan dan kominfo.
9. Masih kurangnya upaya pelestarian perlindungan sumber daya alam (air).
10. Belum optimalnya kegiatan pengendalian pencemaran.
11. Masih kurangnya regulasi tata ruang rinci dan sosialisasi serta penegakkan aturan tata ruang

C. BIDANG EKONOMI

1. Akses dan distribusi pangan
2. Ketersediaan air, kelembagaan petani, saprodi, pasca panen, ternak, hama penyakit tanaman, pupuk
3. Kualitas koperasi, kapasitas pengurus, permodalan koperasi dan UMKM, Keiwirausahaan, PKL
4. Ketersediaan benih, ketersediaan teknologi pakan, sarana penangkapan ikan, nelayan dan pembudidaya ikan , pemasaran hasil perikanan
5. Event budaya/wisata, sanggar seni budaya, desa wisata
6. Pasar, Kapasitas dan sumberdaya pelaku IKM, sentra IKM, PKL
7. Realisasi PAD, informasi perpajakan daerah, tata kelola keuangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 telah disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Visi, misi, strategi dan arah kebijakan yang disampaikan dalam dokumen ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Reviu terhadap dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 dan RENSTRA OPD Tahun 2016-2021 dilakukan pada akhir Tahun 2018 sehingga belum digunakan dalam menyusun dokumen perencanaan dan keuangan Tahun Anggaran 2018. Dokumen LKjIP ini melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2018 yang dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan, dokumen keuangan dan dinamika yang terjadi pada Tahun 2018.

II.1. VISI dan MISI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

II.1.1. VISI

Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- kata **‘beriman’** berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata **‘sejahtera’** berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- kata **‘bermutu’** berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan

berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Visi “Beriman, Sejahtera dan Bermutu” yang disingkat “BERSATU” ini juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menyatukan seluruh komponen masyarakat, tanpa dibatasi oleh perbedaan-perbedaan dalam rangka mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera dan bermutu.

II.1.2. MISI

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL

Misi kesatu menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat. Mendorong pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok yang bersandar pada nilai-nilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal.

2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN Keadilan dan KESETARAAN GENDER

Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terwujudnya Pelestarian Seni Budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olahraga, terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan

lingkungan Terwujudnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu.

3. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS

Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi, berkembangnya sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisir dan pantai, serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna Terwujudnya sinergitas di antara Pemerintah, Swasta, Kaum Cendekia Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Ahli

4. MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRA STRUKTUR YANG MEMADAI

Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi bagi masyarakat yang memadai. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten terwujudnya Infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas, dan merata, terwujudnya pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

5. MEWUJUDKAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

Misi kelima menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang professional, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai terselamatkannya dokumen/ arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan koordinasi pembangunan daerah serta terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik Terwujudnya pengawasan yang professional.

II.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rangkaian langkah terpadu untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien bagi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah lima tahun ke depan, maka dijabarkan dalam strategi dan arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dengan tabel berikut.

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI KESATU: MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya intensitas keterlibatan tokoh agama dalam penanaman nilai-nilai agama	Terwujudnya pola pemberdayaan tokoh agama yang tepat	Fasilitasi, motivasi,	Tokoh agama
Meningkatnya peran lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan dalam pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Terwujudnya lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berkualitas	Sosialisasi, revitalisasi	BAZIS, TPQ, LPTQ
	Terbinanya pengurus rumah ibadah secara berkelanjutan	Motivasi	Marbot/pengurus rumah ibadah
	Terwujudnya rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan masyarakat	Revitalisasi, sosialisasi	Masjid, Musholla, Pura, Gereja
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanaman nilai kearifan lokal	Terwujudnya metode penanaman nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang efektif	Revitalisasi, edukasi, sosialisasi, fasilitasi	Tokoh Masyarakat
Mencegah semakin meluasnya konflik sosial	Tercegah terjadinya konflik social	Revitalisasi, edukasi, sosialisasi, fasilitasi dan deteksi	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan lembaga masyarakat
Mencegah semakin menurunnya partispasi politik masyarakat	Tercegah semakin rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi	Revitalisasi,edukasi, sosialisasi, fasilitasi	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan lembaga agama

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI KEDUA: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya efektifitas pemberdayaan PMKS	Tersedianya sarana prasarana pendukung	Konstruksi, Fasilitasi, Rehabilitasi	Sarana prasarana diffable dan rumah singgah
	Tersedianya data PMKS yang valid	Validasi, inventarisasi	
	Terbinanya PMKS secara berkelanjutan	Fasilitasi	
	Terbinannya lembaga sosial secara berkelanjutan	kooordinasi, fasilitasi	Lembaga sosial
	Tersalurkannya bantuan bagi PMKS	Distribusi	
Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Terwujudnya aparatur pemerintahan desa yang berkualitas	Fasilitasi, edukasi	Pemerintah desa dan BPD
	Terwujudnya kelembagaan desa yang berkualitas	Reorganisasi, deregulasi	Kelembagaan pemerintah desa
	Terwujudnya pembinaan lembaga ekonomi pedesaan yang intensif dan berkelanjutan	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, edukasi, regulasi	lembaga ekonomi perdesaan
	Terwujudnya pola pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pelaku pemberdayaan yang efektif dan berkesinambungan	Mediasi, fasilitasi	lembaga adat, mediator
	Terwujudnya lembaga adat yang berperan aktif dalam masyarakat	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, edukasi	pengurus lembaga adat
	Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri		
Meningkatnya efektifitas pembangunan Keluarga Berencana	Tersedianya prasarana penunjang	Konstruksi, revitalisasi, rekondisi, rehabilitasi	Gedung layanan Keluarga Berencana
	Tersedianya sarana penunjang	Fasilitasi, distribusi	Alat dan Obat Kontrasepsi, BKB KIT
	Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten	Edukasi, sosialisasi	Aparatur dan Kader KB
	Terwujudnya masyarakat yang sadar tentang pentingnya Keluarga Berencana	Sosialisasi	Pasangan Usia Subur
	Tersedianya modal usaha yang memadai	Fasilitasi, Koordinasi, Distribusi	Kelompok UPPKS
	Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan pertama	Sosialisasi, koordinasi, fasilitasi	Kelompok Remaja
	Terwujudnya penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49) tahun	Sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, operasi	Wanita Usia Subur
	Tersedianya lembaga keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang efektif	fasilitasi, koordinasi, revitalisasi	Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
Meningkatnya kualitas dan kapasitas perempuan	Tersedianya sumber daya manusia yang responsif gender	Koordinasi, fasilitasi, edukasi, sosialisasi	Aparatur pemerintah di tingkat Kabupaten sampai Desa
	Tersedianya aturan tentang kesetaraan gender	Regulasi	RAD - Pengarusutamaan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI KEDUA: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Gender
	Terwujudnya kelompok perempuan yang terampil dan mandiri	Fasilitasi, edukasi, koordinasi, distribusi	Modal dan keterampilan kerja bagi buruh migrant
	Tersedianya lembaga pengarusutamaan gender yang profesional	Fasilitasi, koordinasi, revitalisasi	Lembaga penggiat Pengarusutamaan Gender
	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Fasilitasi, Koordinasi, sosialisasi, Konstruksi, Transaksi, Regulasi	LPA dan Penggiat Peduli Anak, Pokja KLA
Meningkatnya efektifitas layanan perlindungan perempuan dan anak	Tersedianya sarana prasarana yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi,transaksi	Shelter (rumah aman) dan sarana pendukungnya
	Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten	Edukasi, fasilitasi, koordinasi, visitasi	Aparatur
	Terwujudnya masyarakat yang paham tentang perlindungan perempuan dan anak	sosialisasi, mediasi, fasilitasi	Masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat
	Tersedianya aturan terkait perlindungan perempuan dan anak	Regulasi, deregulasi, fasilitasi	Juklak, Juknis dan Pedum
	Tersedianya lembaga perlindungan perempuan dan anak yang profesional	Fasilitasi, koordinasi, revitalisasi	Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Meningkatnya efektifitas penanganan transmigrasi	Tersedianya kawasan transmigrasi	Fasilitasi, koordinasi	Kawasan Transmigrasi Lokal dan antar daerah
	Tersedianya sarana prasarana pendukung	Kontsruksi, distribusi, fasilitasi, koordinasi, transaksi	Sarana pendukung pada kawasan transmigrasi
	Terwujudnya transmigran yang terampil dan mandiri	Edukasi, fasilitasi, sosialisasi, visitasi, evaluasi	Transmigran
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi	Sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi, revitalisasi, dan regrouping	Sarana dan prasarana pendidikan Tenaga pendidik dan kependidikan
	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas	Edukasi, fasilitasi	
	Terwujudnya pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan	Redistribusi	
	Terwujudnya tata kelola penyelenggara layanan pendidikan yang baik	evaluasi, supervise	Sekolah
	Terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara	Edukasi	Warga buta aksara
	Terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas	Inventarisasi dan registrasi	Lembaga pendidikan dan kursus
	Terwujudnya pendidikan inklusi	Akreditasi, fasilitasi,	Lembaga pelaksana

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI KEDUA: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	yang berkualitas	investasi	pendidikan inklusi, sarana dan prasarana
Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan sekolah dan masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai	Inventarisasi, investasi	Perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
	Tersedianya tenaga pustakawan yang professional	Edukasi	Calon pustakawan dan pustakawan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembinaan pemuda dan olahraga	tersedianya sarana prasarana yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi	Sarana prasarana
	Terwujudnya sinergi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembinaan pemuda dan olahraga	Koordinasi, edukasi, Promosi, investasi, kompetisi, seleksi	Pemuda, organisasi kepemudaan, pemerhati dan pelaku olahraga
		Promosi, investasi, kompetisi, seleksi	Pemuda, organisasi kepemudaan, pemerhati dan pelaku olahraga
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	Tersedianya tenaga kesehatan yang profesional	Edukasi	Tenaga kesehatan
	Tersedianya fasilitas dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar	Revitalisasi, Konstruksi, rehabilitasi dan investasi	Puskesmas dan jaringannya
		Standarisasi, koordinasi	sarana dan prasarana kesehatan
	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan memadai	Konsultasi, advokasi, fasilitasi dan visitasi	Obat fasilitas kesehatan dasar
	Terwujudnya sistem layanan kesehatan yang baik	Revitalisasi, reorganisasi dan restrukturisasi	Dinas kesehatan, Rumah sakit dan puskesmas serta jaringannya
	Terwujudnya metode promosi PHBS yang tepat	Advokasi, sosialisasi, mobilisasi dan fasilitasi masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat	Masyarakat
	Terlayannya kesehatan gizi ibu dan anak secara tepat	Fasilitasi dan edukasi gizi seimbang bagi ibu, ibu nifas dan balita	ibu dan balita
	Tertanganinya peyakit menular secara berkesinambungan	Fasilitasi dan mobilisasi masyarakat dalam penemuan dan penanganan penderita penyakit Menular dan PTM	Masyarakat
	Terlayannya imunisasi secara berkelanjutan	Mediasi, fasilitasi	bayi, balita, anak sekolah dan ibu hamil
	Terselenggaranya jaminan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat	Sosialisasi koordinasi dan kemitraan penyelenggaraan jaminan kesehatan	jaminan kesehatan
	Tersedianya fasilitas dan perbekalan kesehatan	Rehabilitasi, promosi, konstruksi, investasi	SPM RSUD

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI KEDUA: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pendukung layanan rumah sakit		tata kelola
	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas tatakelola keuangan BLUD rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku	Koordinasi, transparansi, fasilitasi	
	Terwujudnya pola produksi pangan yang baik pada industri rumah tangga pangan	Edukasi dan sosialisasi	industri rumah tangga pangan
	Tersedianya sarana prasarana dan SOP untuk layanan kesehatan ibu, anak	Fasilitasi penyediaan sarana prasarana dan SOP untuk layanan kesehatan ibu, anak	SOP

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI KETIGA: MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja	terwujudnya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja	edukasi, fasilitasi, dan kooordinas	pencari kerja
	Tersedianya lapangan pekerjaan baru	edukasi dan informasi	pencari kerja
	terwujudnya perlindungan terhadap tenaga kerja	fasilitasi, sosialisasi, regulasi dan kooordinas	pekerja dan pengusaha
Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Tersedianya SDM koperasi dan aparatur yang berkompeten	Edukasi, sosialisasi, visitasi	Pengurus koperasi, aparatur pembina koperasi
	Tersedianya permodalan koperasi yang memadai	Sosialisasi dan Fasilitasi	Modal Usaha
	Tersedianya sarana prasarana koperasi yang memadai	Fasilitasi, distribusi	Peralatan kerja
	Tersedianya SDM UMKM dan aparatur yang berkompeten	Fasilitasi, edukasi, sosialisasi, visitasi	Pelaku usaha, aparatur pembina UMKM
	Tersedianya permodalan UMKM yang memadai	Fasilitasi dan sosialisasi	Modal Usaha
	Tersedianya sarana prasarana UMKM yang memadai	Fasilitasi dan distribusi	Peralatan produksi
Meningkatnya Produktifitas dan kualitas hasil Industri Kecil Menengah	Tersedianya sarana prasarana IKM yang memadai	Fasilitasi, distribusi, konstruksi, rehabilitasi	Sentra IKM pada kawasan wisata
	Tersedianya SDM industri kecil menengah dan aparatur kompeten	Fasilitasi, edukasi, visitasi	Pelaku Usaha IKM dan aparatur Pembina
	Tersedianya permodalan IKM yang memadai	Sosialisasi dan fasilitasi	Modal usaha
	Tersedianya kawasan industri kecil menengah yang menjadi	Fasilitasi, konstruksi, rehabilitasi, distribusi,	IKM tenun, gerabah, ketak,

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI KETIGA: MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	tujuan wisata	transaksi	bambu, olahan pangan
Meningkatnya aksesibilitas dan stabilitas perdagangan barang dan jasa	Tersedianya prasarana perdagangan yang memenuhi standar	Rehabilitasi, konstruksi, revitalisasi, relokasi, operasi, koordinasi, fasilitasi, distribusi, sosialisasi	Pasar, Kawasan PKL
	Tersedianya sarana perdagangan yang sesuai standar	Standarisasi, koordinasi	Sarana kemetrologian
	Tersedianya SDM perdagangan yang kompeten	edukasi, visitasi	Pelaku usaha, aparatur pembina, tenaga kemetrologian
Meningkatnya kondusifitas investasi	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Validasi, promosi, regulasi, edukasi	Data potensi investasi
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizian secara prima	fasilitasi, koordinasi, edukasi, konstruksi, investasi	Layanan perizinan dan non perizinan
Meningkatnya produktifitas perikanan dan hasil olahan perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan yang memadai	Fasilitasi, rehabilitasi, konstruksi	Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Balai Benih Ikan (BBI), Unit Perbenihan Rakyat (UPR)
	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang memadai	Fasilitasi, transaksi, distribusi, edukasi	Alat tangkap dan alat budidaya perikanan, teknologi pengolahan pakan ikan, alat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	Terwujudnya kawasan perikanan unggulan	Fasilitasi, distribusi, konstruksi, rehabilitasi, promosi	Kasawan tambak udang, kawasan budidya nila
	Tersedianya pelaku usaha perikanan dan aparatur yang berkualitas	Edukasi, fasilitasi, sosialisasi, visitasi	Nelayan, pembudidaya ikan, kelompok pengolahan hasil perikanan, aparatur
Meningkatnya aminitas (kenyamanan) dan sekuiritas (keamanan) wisatawan	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi, transaksi, fasilitasi, distribusi, regulasi, promosi dan publikasi	Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dengan motto sapta pesona dan Sekolah Tinggi Pariwisata
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif	Regulasi, koordinasi, sosialisasi, edukasi	Masyarakat
	Terselenggaranya event pariwisata yang menarik dan berkelanjutan	Fasilitasi, koordinasi, promosi	Event budaya
	Terwujudnya pelaku wisata	Edukasi, fasilitasi,	Pokdarwis, Tour

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI KETIGA: MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	yang profesional	sosialisasi, koordinasi	Guide
Meningkatnya stabilitas ketahanan pangan	Tersedianya cadangan pangan pemerintah yang memadai	Fasilitasi, transaksi	Ketersediaan Beras
	Tersebar nya pangan yang merata	Koordinasi, Distribusi	Akses pangan, pemantauan pangan
	Terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam	Sosialisasi,edukasi dan fasilitasi, distribusi, diversifikasi	Pemanfaatan pekarangan, pemanfaatan pangan local
Meningkatnya produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan untuk menuju swasembada pangan	Terwujudnya SDM petani dan aparatur pembina yang kompeten	Edukasi, fasilitasi, inventarisasi, validasi, revitalisasi	Petani dan Tenaga penyuluh
	Terpenuhinya sarana prasarana pertanian yang memadai	Fasilitasi, rehabilitasi, konstruksi, distribusi, intensifikasi, ekstensifikasi	SAPRODI, infrastruktur pertanian, lahan pertanian, kawasan hortikultura untuk menunjang pariwisata
	Tersedianya teknologi pertanian	Fasilitasi, edukasi, sosialisasi	Teknologi pengembangan bibit berkualitas, teknologi budidaya tanaman, teknologi mengurangi kehilangan hasil panen dan teknologi pengolahan produk pertanian
	Terwujudnya pelaku usaha perkebunan dan aparatur yang memadai	Edukasi, sosialisasi, visitasi	Petani, petugas pengendali oganisme pengganggu tanaman (OPT)
	Tersedianya sarana dan prasarana perkebunan yang memadai	Fasilitasi, distribusi, konstruksi, rehabilitasi, revitalisasi, intensifikasi	SAPRODI, infrastruktur penunjang perkebunan, lahan perkebunan
	Tersedianya teknologi perkebunan	Fasilitasi, edukasi, sosialisasi	Teknologi pengembangan bibit berkualitas, teknologi budidaya tanaman, teknologi mengurangi kehilangan hasil panen dan teknologi pengolahan hasil

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI KETIGA: MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			perkebunan
	Tersedianya kawasan perkebunan yang menjadi obyek wisata	Fasilitasi, distribusi, konstruksi, rehabilitasi	Kebun kopi dan kebun kakao (kebun dinas)
	Tersedianya sarana dan prasarana peternakan yang memadai	Fasilitasi, distribusi, vaksinasi, inseminasi, transaksi	Infrastruktur penunjang peternakan, pasar ternak, rumah potong hewan, pakan ternak, obat - obatan dan vaksin, bibit ternak berkualitas
	Terwujudnya pelaku usaha peternakan dan aparatur yang memadai	Edukasi	Peternak , aparatur teknis peternakan, dokter hewan, petugas inseminasi
	Tersedianya teknologi peternakan	Fasilitasi, edukasi, sosialisasi	Teknologi pembibitan ternak, penggemukan, pemotongan, pengolahan hasil peternakan
Meningkatnya kualitas sumberdaya hutan dan lahan	Tersedianya sarana pembangunan kehutanan yang memadai	Transaksi, distribusi	Kendaraan patrol
	Terwujudnya aparatur yang memadai	Edukasi	Polisi Kehutanan (Polhut), Petugas Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)
	Terkendalnya kerusakan hutan dan lahan	Koordinasi, sosialisasi, rehabilitasi, reboisasi, konservasi, penegakan hokum	Kawasan hutan lindung dan produksi, lahan kritis
	Tersedianya teknologi tepat guna	Fasilitasi, edukasi, sosialisasi	Teknologi silvikultur, teknologi pengolahan hasil hutan
Mewujudkan sisten inovasi daerah yang berkualitas	Terwujudnya sistem dan kelembagaan sistem dan inovasi daerah yang efektif	Regulasi, revitalisasi, koordinasi, sinkronisasi, sinergi, harmonisasi	Sistem inovasi daerah
Mewujudkan stabilitas kamtibmas	Terciptanya ketentraman, kenyamanan dan perlindungan masyarakat	Sosialisasi, koordinasi, operasi, investasi, fasilitasi, konstruksi, alokasi	Kamtibmas

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI KEEMPAT: MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya efektifitas pengelolaan ruang wilayah	Tersedianya rencana rinci tata ruang yang memadai	koordinasi, investasi, regulasi, sinkronisasi	kawasan perkotaan-perdesaan
	Tersedianya perencana wilayah yang kompeten dan memadai	Edukasi	Perencana Wilayah
	Tersedianya sistem pendukung	Fasilitasi	Sistem informasi Geospasial
	terwujudnya perencanaan ruang yang berkualitas	Regulasi	dokumen tata ruang
	Terlaksananya penyebaran informasi terkait tata ruang	Sosialisasi, koordinasi	Masyarakat
Meningkatnya utilitas pendukung prasarana jalan	Tersedianya PJU yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi	Perkotaan, kawasan pariwisata, kawasan produksi, pusat-pusat perekonomian
Meningkatnya konektifitas pembangunan antar wilayah	Tersedianya jalan dalam kondisi yang mantap	Investasi, konstruksi, rehabilitasi	Jalan di kabupaten lombok tengah
	Tersedianya sarana dan prasarana utilitas perkotaan	Investasi, konstruksi, rehabilitasi	prasarana sarana dan utilitas perkotaan
Meningkatnya kuantitas penyediaan air baku	tersedianya saluran irigasi yang memadai	Rehabilitasi, konstruksi	Saluran Primer dan sekunder
	Tersedianya debit air pada bangunan utama	Rehabilitasi, konstruksi, investasi	air permukaan di bangunan air (bendung)
Meningkatnya kualitas layanan persampahan	Terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif	Rehabilitasi, konstruksi dan investasi	TPA, TPS
	Tersedianya lembaga pengelola persampahan yang profesional	Fasilitasi, sosialisasi	Bank Sampah, lembaga pendidikan, Lingkungan perkotaan
	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memadai	Transaksi	Tempat sampah terpilah dan pengolah sampah 3R
Meningkatnya aminitas (kenyamanan) dan sekuritas (keselamatan) pengguna jalan	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi	Jalan di kabupaten lombok tengah
	Tersedianya layanan moda transportasi	Investasi, regulasi, koordinasi, konstruksi,	Moda transportasi
	Tersedianya tenaga teknis yang memadai	Edukasi, visitasi	aparatur LLAJ, penguji kendaraan bermotor, tenaga IT
Meningkatnya aksesibilitas komunikasi dan informasi antar wilayah	Tersedianya sistem komunikasi dan informatika yang memadai	Koordinasi, fasilitasi	Blank Spot Area dan Daerah Terpencil
Meningkatnya kualitas	Terwujudnya kesadaran	Edukasi, sosialisasi	Masyarakat

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI KEEMPAT: MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
lingkungan permukiman	masayarakat untuk phbs		
	Tersedianya sarpras sanitasi	Konstruksi, sosialisasi	Masyarakat
	Tersedianya prasarana perumahan yang memadai	Fasilitasi, rehabilitasi	rumah tidak layak huni
	Menurunnya luasan kawasan kumuh	Rehabilitasi, konstruksi, relokasi	kawasan kumuh perkotaan
Meningkatnya kualitas layanan air bersih	Tersedianya sarpras air bersih	Rehabilitasi, konstruksi	Perumahan dan permukiman tidak terjangkau PDAM
Meningkatnya efektifitas penanganan kebencanaan	Tersedianya aparatur kebencanaan yang kompeten	Edukasi, koordinasi, Fasilitasi	Tagana, Petuga PMK, Tim Reaksi Cepat
	Tersedianya prasarana yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi	Prasarana kebencanaan (Bangunan BPBD, Bangunan PMK, Bangunan Evakuasi)
	Tersedianya sarana yang memadai	Transaksi, distribusi, fasilitasi, koordinasi	Sarana kebencanaan (Mobil PMK, Mobil Air Bersih, Dapur Umum, perahu karet, dst).
	Tersedianya sistem peringatan dini kebencanaan	Fasilitasi, konsolidasi, koordinasi, investasi, mitigasi, transaksi	Early Warning System
	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Sosialisasi, edukasi, fasilitasi, koordinasi	Masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana dan Desa tangguh / siaga bencana
	Tertanganinya korban bencana secara terpadu	Fasilitasi, Koordinasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi	Korban bencana dan Kawasan Bencana
Mencegah semakin menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	Tersedianya sarana pendukung yang memadai	Fasilitasi	Laboratorium dan sarana pendukung
	Tersedianya tenaga yang terampil	Edukasi	Tenaga Laboratorium
	Terwujudnya masyarakat sadar lingkungan	Sosialisasi	Masyarakat perkotaan, masyarakat sekitar hutan, masyarakat sekitar DAS dan masyarakat di kawasan wisata
	Tercegaah semakin menurunnya daya dukung lingkungan	Konservasi	Sumber-sumber mata air , Lingkungan Tercemar dan lahan kritis
	Terwujudnya keamanan lingkungan strategis yang	Koordinasi	Kawasan konservasi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI KEEMPAT: MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	kondusif		
	Tersedianya data/informasi SDA dan LH yang valid	Inventarisasi, Evaluasi, dan Rekomendasi	Status Lingkungan Perkotaan dan Lingkungan Tercemar

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI KELIMA: MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kapasitas pemda dalam pelayanan publik	Tersedianya aparatur yang berkompeten	Edukasi ,	Aparatur pemerintah
	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Investasi, konstruksi	SKPD
	Tersedianya gedung kantor Bupati dan DPRD	investasi, konstruksi	Gedung DPRD dan Kantor Bupati
	Tertatanya adiministrasi perkantoran	Revitalisasi	Administrasi
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Koordinasi	Pemerintah daerah
	terwujudnya perumusan kebijakan dan pengendalian kebijakan kepala daerah secara komprehensif	koordinasi, deregulasi, fasilitasi, publikasi, investasi, konsolidasi, sinkronisasi, restrukturisasi, evaluasi	Penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Terwujudnya manajemen Apartur Sipil Negara	Revitalisasi, edukasi, koodinasi, integrasi, restrukturisasi, deregulasi	SKPD
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Regulasi,Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, koordinasi, rasionalisasi	keuangan daerah
	Terwujudnya kapasitas keuangan daerah yang memadai	Regulasi,Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, koordinasi, rasionalisasi	Pendapatan asli daerah
	Terwujudnya manajemen arsip yang berkualitas	Revitaliasi, edukasi	Arsip daerah
	tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	Investasi	Infrastruktur pemerintah
	Terwujudnya peningkatan kooordinasi pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sosialisasi, audiensi, inspeksi dan koordinasi	Kepala & wakil kepala daerah
	Terwujudnya akses publik terhadap informasi pembangunan	Publikasi dan sosialisasi	Media massa

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI KELIMA: MEWUJUDKAN KEPERMERINTAHAN YG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan	Sosialisasi, deregulasi, validasi, verifikasi, sinkronisasi, standarisasi, konstruksi dan koordinasi	Sistem administrasi kependudukan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya metode perencanaan daerah yang komprehensif dan partisipatif	Koordinasi, edukasi, evaluasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan inovasi	Dokumen perencanaan pembangunan
	Terwujudnya penyediaan data yang valid dan berkualitas	Revitaliasi, inventarasi, koordinasi, validasi	Data perencanaan daerah
	Terwujudnya kerjasama pembangunan yang sinergis	Koordinasi, evaluasi, sinergi, fasilitasi, dan inovasi	Pemerintah dunia usaha masyarakat
	Terwujudnya pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	Koordinasi, konstruksi, rehabilitasi, investasi, mediasi, fasilitasi, deregulasi, konsultasi	Pemerintah Kecamatan
Mencegah semakin tingginya pelanggaran perda	Tercega semakin maraknya pelanggaran perda	Edukasi dan sosialisasi	Aparatur penyidik PNS dan penegak perda
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah	Terwujudnya profesionalisme APIP dalam pengawasan tata kelola pemerintahan yang baik	Edukasi	Aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP)
	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan	Inspeksi	SKPD, Satker, dan pengelola keuangan Negara
Meningkatkan kapasitas DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terpenuhinya kebutuhan administratif yang memadai dalam pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Fasilitasi, regulasi, visitasi, konsolidasi, edukasi dan koordinasi	Lembaga perwakilan rakyat daerah

Sumber: Dokumen RPJMD Kab. Lombok Tengah Tahun 2016-2021

II.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 129.a Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Secara rinci, IKU Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kami jabarkan dalam dokumen *terlampir*.

II.4. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai janji dan panduan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2018 berdasarkan dokumen perencanaan dan DPA Tahun Anggaran 2018 yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 secara lengkap kami sampaikan sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

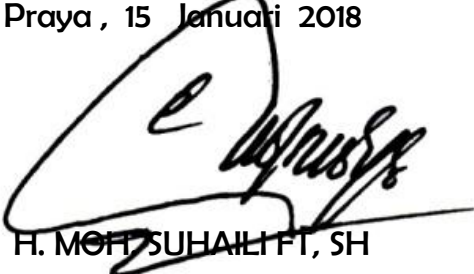
Nama : H. MOH. SUHAILI FT, SH

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Praya , 15 Januari 2018



H. MOH. SUHAILI FT, SH

PERJANJIAN KINERJA

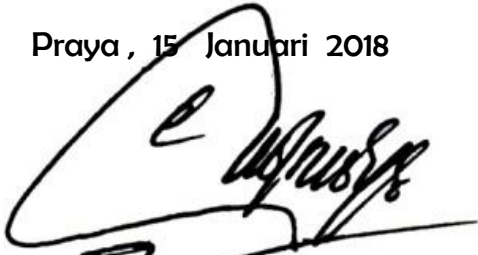
KABUPATEN : LOMBOK TENGAH

TAHUN ANGGARAN : 2018

No	Sasaran strategis	No	Indikator	Satuan	Target
1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1	- PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Rp.Juta	15.829.965,54
		2	- PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Rp.Juta	12.225.055,65
		3	- Laju Pertumbuhan PDRB	%	6,00
		4	- PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Rp	16.850.983,48
		5	- PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Rp	13.013.560,28
		6	PDRB Sektor perdagangan	Juta Rupiah	902.795,99
		7	IPM	Point	64,78
2	Terbinanya PMKS secara berkelanjutan	8	Persentase penduduk miskin*	%	15,32
		9	Cakupan layanan PMKS	%	24,50
3	Terwujudnya metode penanaman nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang efektif	10	Prosentase konflik yang dapat dimediasi	%	100
4	Terwujudnya sistem layanan kesehatan yang baik	11	Jumlah Puskesmas BLUD	unit	5
5	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang memadai	12	- APK PAUD	%	67,62
		13	- APK SD/MI/Paket A	%	110,22
		14	- APK SMP/MTs/Paket B	%	102,84
		15	- APM SD/MI/Paket A	%	99,97
		16	- APM SMP/MTs/Paket B	%	97,03
		17	Jumlah Penduduk Buta Huruf (15 tahun keatas)	Jiwa	35.449
6	Tersedianya lapangan pekerjaan baru	18	Tingkat Pengangguran Terbuka*	%	5,77
7	Tersedianya jalan dalam kondisi yang mantap	19	Prosentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	69,74
8	Tersedianya sarana dan prasarana utilitas perkotaan	20	Cakupan Layanan Trayek Angkutan Kawasan Strategis Kabupaten yang Terlayani	Trayek	12
9	Menurunnya luasan kawasan kumuh	21	Kawasan Kumuh Perkotaan	Ha	92
10	Tercega semakin menurunnya daya dukung lingkungan	22	Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten (IKLH)	Point	67,2
11	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat erhadap dokumen kependudukan	23	- Tingkat Kepemilikan KTP	%	74,12
		24	- Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	%	72,93
		25	- Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	%	85,23
12	Terwujudnya pengendalian jumlah penduduk	26	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,02
13	Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan pertama	27	Rata-rata usia kawin Pertama Perempuan	Tahun	20,4
14	Terwujudnya koperasi yang berkualitas	28	Jumlah Koperasi berkualitas	Unit	325
15	Tersedianya SDM UMKM dan aparatur yang berkompeten	29	Jumlah UMKM	Unit	156.977
16	Tersedianya teknologi pertanian	30	Produksi Komoditas Pangan (padi)	Ton/ Tahun	489.357
17	Terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam	31	Pola Pangan Harapan	Point	86,30
18	Tersedianya sarana dan prasarana	32	Rata-rata Lama Tinggal wisatawan	Hari	3,65

No	Sasaran strategis	No	Indikator	Satuan	Target
	pariwisata yang memadai serta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif	3	- Jumlah Wisatawan Domestik	Orang	72.274
		3			
		4	- Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	62.435
19	Terwujudnya peningkatan produksi perikanan	35	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	32.206,46
20	Tersedianya sarana prasarana IKM yang memadai	36	Unit Usaha Pengolahan Pangan dengan Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Unit	190
21	Terwujudnya kapasitas keuangan daerah yang memadai	37	Target PAD	Rp	168.959.227.045,74

Praya , 15 Januari 2018



H. MOH. SUHAILI FT, SH

II.5. METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

LKj-IP harus disusun berdasarkan data dan informasi yang valid, relevan, dan terpercaya. Data Kinerja dalam laporan ini diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber utama, yaitu:

- a. Sumber Data Internal, yaitu: data yang berasal dari Unit Kerja (SKPD teknis) yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan. Untuk menyusun data internal ini, OPD menyusun dan melakukan pengolahan data yang terangkum dalam profil OPD atau laporan statistik sektoral sesuai Tupoksi dan target kinerja OPD. Contoh : Profil Pendidikan di Dinas Pendidikan, Profil Kesehatan di Dinas Kesehatan, Laporan Kamtrantibmas di Satpol PP, Laporan kondisi jalan di Dinas PUPR, Laporan SIAK di DISDUKCAPIL, Laporan SIMPEG di BKPP, Laporan pelaksanaan Monev pada Bagian APLPSE di SETDA, dll.
- b. Sumber Data Eksternal, yaitu: data yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah baik berupa data primer maupun data sekunder (Pemprov. NTB, Instansi vertikal, NGO, dll). Data sekunder adalah data yang secara rutin dikumpulkan oleh instansi yang bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dapat pula bersumber dari hasil survei lapangan atau wawancara berdasarkan metoda survei dan metoda analisis data yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Contoh: Data Pertanahan dari Kantor Pertanahan, data pelanggan air minum pada PDAM, Dokumen Lombok Tengah Dalam Angka dan data statistik lainnya pada BPS.

Adapun tahapan dalam pengumpulan data kinerja kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tim Penyusun LKjIP Kabupaten mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan dari OPD teknis, instansi vertikal dan/ atau sumber-sumber lainnya. Kebutuhan data ini terinci mengenai format, jenis, waktu, sumber dan dokumen pendukung yang diperlukan. Selain itu, Tim juga meminta uraian/ penjelasan tentang capaian target kinerja dari masing-masing OPD;
2. Tim Kabupaten menyampaikan daftar kebutuhan data kepada OPD disertai batas waktu penyampaian data;
3. Tim Kabupaten dibantu oleh tim pengumpul data yang bertugas untuk:
 - Meminta data kepada OPD jika belum menyampaikan laporan/ data sesuai batas waktu yang ditentukan;
 - Meminta perbaikan data kepada OPD yang menyampaikan data tidak sesuai dengan format atau kebutuhan yang diinginkan;
 - Sebagai penghubung antara OPD dengan tim kabupaten.
4. Tim Kabupaten meng-*entry* data yang disampaikan OPD;

5. Tim Kabupaten melakukan analisis data dan menyampaikan dalam format Laporan;
6. Draf laporan kemudian dikoordinasikan dengan OPD untuk melakukan kros cek terhadap data yang dicantumkan di dalam laporan;
7. Perbaikan laporan dilakukan secara simultan antara kros cek OPD, revidi oleh APIP Kabupaten;
8. Finalisasi laporan berdasarkan revidi APIP dan masukan dari OPD.

Dalam rangka memberikan pedoman dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 165.a Tahun 2016 tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja. *Dokumen terlampir.*

II.6. PROSEDUR PENYUSUNAN LKjIP

Penyusunan LKjIP Pemerintah Lombok Tengah dilakukan secara sistematis sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Dokumen SOP terlampir.*

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam pencapaian perjanjian kinerja (PK) Bupati Lombok Tengah Tahun 2018.

III.1. CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018

Rincian tujuan dan sasaran strategis pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan		SASARAN	
1	Meningkatnya kondusifitas investasi	1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif
2	Meningkatnya efektifitas pemberdayaan PMKS	2	Terbinanya PMKS secara berkelanjutan
3	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanaman nilai kearifan lokal	3	Terwujudnya metode penanaman nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang efektif
4	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	4	Terwujudnya sistem layanan kesehatan yang baik
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan	5	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memadai
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja	6	Tersedianya lapangan pekerjaan baru
7	Meningkatnya konektifitas pembangunan antar wilayah	7	Tersedianya jalan dalam kondisi yang mantap
		8	Tersedianya sarana dan prasarana utilitas perkotaan
8	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	9	Menurunnya luasan kawasan kumuh
9	Mencegah semakin menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	10	Tercegah semakin menurunnya daya dukung lingkungan
10	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	11	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan
11	Meningkatnya efektifitas pembangunan Keluarga Berencana	12	Terwujudnya pengendalian jumlah penduduk
		13	Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan pertama
12	Meningkatnya kualitas koperasi	14	Terwujudnya koperasi yang berkualitas

Tujuan		SASARAN	
	dan UMKM	15	Tersedianya SDM UMKM dan aparatur yang berkompeten
13	Meningkatnya produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan untuk menuju swasembada pangan	16	Tersedianya teknologi pertanian
14	Meningkatnya stabilitas ketahanan pangan	17	Terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam
15	Meningkatnya aminitas (kenyamanan) dan sekuiritas (keamanan) wisatawan	18	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai
16	Meningkatnya produktifitas perikanan dan hasil olahan perikanan	19	Terwujudnya peningkatan produksi perikanan
17	Meningkatnya Produktifitas dan kualitas hasil Industri Kecil Menengah	20	Tersedianya sarana prasarana IKM yang memadai
18	Meningkatkan kapasitas pemda dalam pelayanan publik	21	Terwujudnya kapasitas keuangan daerah yang memadai

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Lombok Tengah Tahun 2016-2021 (bab 5 dan bab 7) dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Lombok Tengah Tahun 2018

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja dari suatu instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dalam bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Rencana- (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

k menilai keberhasilan pencapaian indikator digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Lebih dari 100	SANGAT BAIK
2	Nilai 86 s.d 100	BAIK
3	Nilai 71 s.d 85	SEDANG
4	Nilai 56 s.d 70	KURANG
5	Nilai ≤ 55	SANGAT KURANG

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

- I. Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai nilai agama dan kearifan lokal
- II. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender
- III. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas
- IV. Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infra struktur yang memadai
- V. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Hingga akhir tahun 2018 , Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Ringkasan capaian indikator sasaran tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

MISI KE	TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN			KRITERIA CAPAIAN SASARAN	JUMLAH DAN CAPAIAN INDIATOR SASARAN
III	1	Meningkatnya kondusifitas investasi	1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	111%	SANGAT BAIK	Terdiri atas 7 Indikator <ul style="list-style-type: none">• 3 indikator (SB)• 4 indikator (B)
II	2	Meningkatnya efektifitas pemberdayaan PMKS	2	Terbinanya PMKS secara berkelanjutan	108%	SANGAT BAIK	Terdiri atas 2 Indikator <ul style="list-style-type: none">• 1 indikator (SB)• 1 indikator (B)

MISI KE	TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN			KRITERIA CAPAIAN SASARAN	JUMLAH DAN CAPAIAN INDIATOR SASARAN
I	3	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanaman nilai kearifan lokal	3	Terwujudnya metode penanaman nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang efektif	100%	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> 1 Indikator (B)
II	4	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	4	Terwujudnya sistem layanan kesehatan yang baik	100%	BAIK	1 Indikator (B)
II	5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan	5	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memadai	114%	SANGAT BAIK	Terdiri atas 6 Indikator <ul style="list-style-type: none"> 3 indikator (SB) 3 indikator (B)
III	6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja	6	Tersedianya lapangan pekerjaan baru	147%	SANGAT BAIK	1 Indikator (SB)
IV	7	Meningkatnya konektifitas pembangunan antar wilayah	7	Tersedianya jalan dalam kondisi yang mantap	98%	BAIK	1 Indikator (B)
			8	Tersedianya sarana dan prasarana utilitas perkotaan	133%	SANGAT BAIK	1 Indikator (SB)
IV	8	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	9	Menurunnya luasan kawasan kumuh	123%	SANGAT BAIK	1 Indikator (SB)
IV	9	Mencegah semakin menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	10	Tercega semakin menurunnya daya dukung lingkungan	87%	BAIK	1 Indikator (B)
V	10	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	11	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan	110%	SANGAT BAIK	Terdiri atas 3 indikator (SB)
II	11	Meningkatnya efektifitas pembangunan Keluarga Berencana	12	Terwujudnya pengendalian jumlah penduduk	92%	BAIK	1 Indikator (B)
			13	Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan pertama	96%	BAIK	1 Indikator (B)
III	12	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	14	Terwujudnya koperasi yang berkualitas	102%	SANGAT BAIK	1 Indikator (SB)
			15	Tersedianya SDM UMKM dan aparatur yang berkompeten	101%	SANGAT BAIK	1 Indikator (SB)
III	13	Meningkatnya produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan untuk menuju swasembada	16	Tersedianya teknologi pertanian	108%	SANGAT BAIK	1 Indikator (SB)

MISI KE	TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN			KRITERIA CAPAIAN SASARAN	JUMLAH DAN CAPAIAN INDIATOR SASARAN
		pangan					
III	14	Meningkatnya stabilitas ketahanan pangan	17	Terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam	99%	BAIK	1 Indikator (B)
IV	15	Meningkatnya aminitas (kenyamanan) dan sekuiritas (keamanan) wisatawan	18	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai	103%	SANGAT BAIK	Terdiri atas 3 Indikator <ul style="list-style-type: none"> • 2 indikator (SB) • 3 indikator (B)
III	16	Meningkatnya produktifitas perikanan dan hasil olahan perikanan	19	Terwujudnya peningkatan produksi perikanan	228%	SANGAT BAIK	1 Indikator (SB)
III	17	Meningkatnya Produktifitas dan kualitas hasil Industri Kecil Menengah	20	Tersedianya sarana prasarana IKM yang memadai	135%	SANGAT BAIK	1 Indikator (SB)
V	18	Meningkatkan kapasitas pemda dalam pelayanan publik	21	Terwujudnya kapasitas keuangan daerah yang memadai	105%	SANGAT BAIK	1 Indikator (SB)

Secara umum capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Pada Tahun 2018 adalah “sangat baik”. Adapun uraian capaian kinerja per sasaran kami jabarkan sebagai berikut:

III.1.1. SASARAN 1
TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF

Sasaran tersebut diukur dengan 7 (Tujuh) indikator yaitu:

1.

RB Atas Dasar Harga Berlaku;

PD
2.

RB Atas Dasar Harga Konstan;

PD
3.

u Pertumbuhan PDRB

Laj
4.

RB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku;

PD
5.

RB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan;

PD
6.

b Sektor Perdagangan;

Pdr

7.

Ind

eks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2018*	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	PDRB atas dasar harga berlaku	Rp Juta	15.829.965,54	17.786.549,28	15.957.730	101%	90%	14.675.875,86	98%	Buku PDRB Kabupaten Lombok Tengah Menurut Pengeluaran 2013-2017 (BPS Kab. Lombok Tengah) Hal: 51	Lintas OPD
2	PDRB atas dasar harga konstan	Rp Juta	12.225.055,65	13.736.072,53	11.555.950	95%	84%	10.853.939,77	94%		
3	Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan	%	6,00	6,00	5,42	90%	90%	5,67	95%		
4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Rp	16.850.983,48	18.616.646,96	17.144.160	102%	92%	15.915.920	99%		
5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan	Rp	13.013.560,28	14.377.134,58	12.415.120	95%	86%	11.771.050	95%		
6	PDRB Sektor perdagangan	Juta Rupiah	902.795,99	1.255.562,16	1.761.710	195%	140%	1.689.252	221%	Buku PDRB Kabupaten Lombok Tengah Menurut Pengeluaran 2013-2017 (BPS Kab. Lombok Tengah) Hal: 1 (LAMPIRAN)	
7	IPM	Point	64,78	66,02	64,36	99%	97%	63,22	99%	Buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah 2017 (BPS Lombok Tengah) Hal: 42	
Rata-rata						111%	Kriteria 2018: SANGAT BAIK	114%	Kriteria 2017: SANGAT BAIK		

Sumber: Buku PDRB Lombok Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2018, www.lomboktengahkab.bps.go.id
Ket: * Kondisi Tahun 2017 dan bersifat “sangat sementara”.
Data Tahun 2018 belum dipublikasikan oleh BPS

❖ Analisis

Perbandingan PDRB, PDRB perkapita, Laju Pertumbuhan PDRB dan IPM tahun 2018 dengan kondisi tahun Tahun 2017 tidak dapat dilakukan secara *up date* karena sampai dengan akhir penyusunan dokumen ini, BPS belum merilis PDRB, PDRB perkapita, Laju Pertumbuhan PDRB dan IPM tahun 2018. Bahkan data PDRB, PDRB perkapita, Laju Pertumbuhan PDRB dan IPM tahun 2017 yang ditampilkan dalam dokumen ini pun masih bersifat “sangat sementara”.

Oleh karena itu dalam dokumen ini hanya dapat ditampilkan beberapa pemaparan secara terbatas sebagai berikut:

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Lombok Tengah, 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	10 243,52	11 665,56	13 125,82	14 569,11	15 957,73
- ADHK 2010	9 153,91	9 728,88	10 274,09	10 859,30	11 555,95
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	11 460,34	12 912,50	14 378,48	15 800,13	17 144,16
- ADHK 2010	10 241,30	10 768,80	11 254,60	11 776,86	12 415,12
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	5,05	5,15	4,51	4,64	5,42
Jumlah penduduk pertengahan tahun (orang)	893 823	903 432	912 879	922 088	930 797
Pertumbuhan	1,13	1,08	1,05	1,01	0,94

Sumber: BPS Lombok Tengah, Buku PDRB Kabupaten Lombok Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017, Halaman : 51

Keterangan: * angka sementara; **angka sangat sementara

Nilai Komponen IPM Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010-2017

Tahun	Angka Harpan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	63,42	11,54	4,55	8 464	58,97
2011	63,72	11,56	4,96	8 530	59,77
2012	64,00	11,82	5,20	8 567	60,57
2013	64,30	12,08	5,36	8 605	61,25
2014	64,45	12,36	5,52	8 652	61,88
2015	64,75	12,81	5,54	8 846	62,74
2016	65,01	12,83	5,60	9 079	63,22
2017	65,28	13,13	5,95	9 319	64,36

Berdasarkan kategori besaran IPM, maka IPM Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 termasuk kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM pertahunnya. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan IPM Kabupaten Lombok Tengah berfluktuatif dengan tren yang menunjukkan penurunan seperti halnya tren pertumbuhan IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perkembangan IPM dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM selama periode 2010–2017. Perubahan itu bisa berupa peningkatan atau penurunan besaran persen/rate dari komponen IPM yaitu angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Perubahan masing-masing komponen dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan sangat dinamis.

❖ Pendukung/ hambatan :

Capaian kinerja PDRB dan IPM dengan predikat “baik” didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Fokus pembangunan dan perhatian pemerintah daerah pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian;
- Meningkatnya sinergitas lintas program, lintas sektor dan stakeholder terkait dalam pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian;
- Meningkatnya upaya promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya dalam menanggukangi penyakit menular/ tidak menular, gizi buruk, kematian ibu dan anak, dll.
- Banyaknya sosialisasi dan pelatihan terhadap pola hidup bersih dan sehat;
- Peningkatan kompetensi tenaga medis;
- Kondisi yang aman dan tertib dapat memberikan pengaruh positif bagi investor yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Lombok Tengah;
- Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan dan irigasi yang mendukung perkembangan perekonomian secara langsung atau tidak langsung;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada bidang perizinan.

III.1.2. SASARAN 2
TERBINANYA PMKS SECARA BERKELANJUTAN

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu “**prosentase penduduk miskin**” dan “**cakupan layanan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)**”. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018*	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Persentase penduduk miskin	%	15,32	14,86	15,31	100%	97%	15,80	98%	Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 (BPS Lombok Tengah) Hal: 59	Lintas OPD
2	Cakupan layanan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)	%	24,50	26,00	28,27	115%	109%	51,8	216%	LKJ-IP Dinas Sosial Tahun 2018. Halaman 25	Dinas Sosial
Rata-rata						108%	Kriteria 2018: SANGAT BAIK		157%	Kriteria 2017: SANGAT BAIK	

Sumber: BPS Lombok Tengah Tahun 2018 dan LKjIP Dinas Sosial Tahun 2018
Ket: * Kondisi Tahun 2017 dan bersifat “sangat sementara”. Data Tahun 2018 belum dipublikasikan oleh BPS

❖ Analisis

Perbandingan persentase penduduk miskin tahun 2018 dengan persentase penduduk miskin Tahun 2017 tidak dapat dilakukan secara *up date* karena sampai dengan akhir penyusunan dokumen ini, BPS belum merilis persentase penduduk miskin tahun 2018. Bahkan persentase penduduk miskin tahun 2017 yang ditampilkan saat ini pun masih bersifat “sangat sementara”.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian Indikator yaitu peran aktif OPD dalam berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait upaya penanganan permasalahan permasalahan sosial yang ada di Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Sosial mendapatkan berbagai Program Pemberdayaan, Rehabilitasi dan jaminan sosial bagi PMKS yang Sumber Pendanaanya berasal dari APBN maupun APBD II.

❖ Pendukung/ hambatan:

Capaian kinerja sasaran ini “baik” karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dalam visi, misi dan penjabaran dalam perencanaan pemerintah daerah;
2. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
3. Adanya program/ kegiatan yang secara langsung bertujuan mengurangi kemiskinan seperti: rehab rumah tidak layak huni oleh dinas Perumahan dan Permukiman, kursus/ pelatihan keterampilan oleh BLK (Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi), Bantuan sosial kepada PMKS oleh Dinas Sosial, bantuan peralatan usaha bari UKM, dll
4. Adanya partisipasi Bazda, NGO dan CSR perusahaan-perusahaan dalam upaya penanggulanagn kemiskinan di daerah;
5. Perluasan lapangan kerja melalui proyek-proyek pembangunan dan pelaksanaan job fair di daerah.

III.1.4. SASARAN 3
TERWUJUDNYA METODE PENANAMAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT YANG EFEKTIF

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu “**prosentase konflik yang dapat dimediasi**”. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	prosentase konflik yang dapat dimediasi	%	100	100	100	100%	100%	100	100%	Matrik Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 (BAPPEDA Kab. Lombok Tengah). Indikator nomor : 5	Sat Pol PP, Bakesbangpoldagri
Rata-rata						100%	Kriteria 2018: BAIK	100%	Kriteria 2017: BAIK		

Sumber : BAPPEDA Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

❖ Analisis :

Pencapaian indikator ini pada Tahun 2018 telah memenuhi target 100%. Capaian ini sama dengan pencapaian tahun 2017. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi serta adanya akulturasi budaya dan semangat toleransi tinggi antara masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah yang

telah terjalin dengan baik. Selain itu, hal yang paling mendukung capaian kinerja tersebut adalah adanya aparat pemerintah dan petugas Kamtrantib pada setiap level tingkatan masyarakat yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Beberapa organisasi yang mendukung kerukunan dan akulturasi budaya dan kamtrantib di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a) Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)
- b) Forum Pembauran Kebangsaan (FKB)
- c) Majelis Adat Sasak;
- d) Koordinasi Keluarga Bima Dompu (KKBD);
- e) Perhimpunan masyarakat etnis tionghoa;
- f) Forum pimpinan Kabupaten, Kecamatan dan desa/ kelurahan;
- g) Komunitas intelijen daerah (Kominda)
- h) Badan Keamanan Desa/ Kelurahan;
- i) Pengamanan Swakarsa (Pam swakarsa);
- j) Bale mediasi
- k) Siskamling, dll.

❖ Pendukung / hambatan :

- Efektifitas mediasi dan fasilitasi yang dilakukan aparat Pemerintah beserta seluruh unsur kamtrantib (babinsa, polmas, pol pp, BKD, Bale mediasi desa, Krame dese dll);
- Adanya kegiatan yang dilaksanakan Sat. Pol. PP yang langsung menyasar (mengarah) ke masyarakat sehubungan dengan penyuluhan/sosialisasi produk-produk hukum
- Adanya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang dikhususkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan di lingkungan Lombok Tengah
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan
- Dukungan pihak-pihak terkait dalam menciptakan suasana keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif
- Keselarasan antara program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan keinginan/harapan masyarakat, sehingga menimbulkan kepuasan di masyarakat.

III.1.5. SASARAN 4
TERWUJUDNYA SISTEM LAYANAN KESEHATAN YANG BAIK

Sasaran tersebut diukur dengan indikator “Jumlah Puskesmas BLUD” dengan pencapaian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Jumlah Puskesmas BLUD	Unit	5	7	5	100	100	5	100	Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 01 Tahun 2017	Dinas Kesehatan
Rata-rata						100%	Kriteria 2018 : BAIK		100%	Kriteria 2017 : BAIK	

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Tahun 2018

❖ Analisis :

Capaian target indikator ini pada tahun 2018 adalah 100%, sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%. Penetapan Puskesmas sebagai BLUD ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 01 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 tentang Penetapan Puskesmas Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 tidak ada Puskesmas yang ditetapkan menjadi BLUD. Berikut daftar Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai BLUD, yaitu:

- 1. Puskesmas Praya;
- 2. Puskesmas Aik Darek;
- 3. Puskesmas Puyung;
- 4. Puskesmas Janapria;
- 5. Puskesmas Aik Mual.

❖ Pendukung/ hambatan:

- 1. Adanya kegiatan standarisasi / akreditasi Puskesmas;
- 2. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan publik. Contoh adanya kegiatan rehab Puskesmas agar prasarana Puskesmas lebih nyaman dan memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- 3. Peningkatan kapasitas SDM Puskesmas;
- 4. Kegiatan Monev ke Puskesmas secara rutin.

III.1.6. SASARAN 5

TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR YANG MEMADAI

Sasaran tersebut diukur dengan 6 (enam) indikator yaitu:

- 1. Angka Partisipasi Kasar PAUD;
- 2. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A
- 3. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B
- 4. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A
- 5. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B
- 6. Jumlah Penduduk Buta Huruf (15 tahun keatas)

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	APK PAUD	%	67,62	71,61	68,11	101%	95%	67,72	103%	LKj-IP Dinas Pendidikan Tahun 2018 Halaman :27,32 dan 37	Dinas Pendidikan
2	APK SD/MI/Paket A	%	110,22	108,20	109,20	99%	101%	116,81	105%		
3	APK SMP/MTs/Paket B	%	102,84	103,17	102,13	99%	99%	102,69	100%		
4	APM SD/MI/Paket A	%	99,97	100,00	98,73	99%	99%	99,97	100%		
5	APM SMP/MTs/Paket B	%	97,03	98,50	98,31	101%	100%	96,42	100%		
6	Jumlah Penduduk Buta Huruf (15 tahun keatas)	Jiwa	35.449	20.475	5.100	186%	175%	73032	43%		
Rata-rata						114 %	Kriteria 2018: SANGAT BAIK	92%	Kriteria 2017: BAIK		

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah Tahun 2018.

❖ Analisis :

Capaian sasaran “tersedianya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memadai” pada tahun 2018 sangat memuaskan. Seluruh indikator kinerja (6 buah indikator) meraih hasil baik dan bahkan capaian 4 (empat) indikator telah melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten pada urusan pendidikan telah dilaksanakan dengan cukup baik.

❖ Pendukung / hambatan:

- a) Faktor pendukung
- Banyaknya jumlah lembaga PAUD terutama swasta yang dikelola masyarakat atau yayasan sehingga berdampak kepada meningkatnya jumlah daya tampung;
 - Tingginya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan akses dan layanan pendidikan dasar bagi masyarakat khususnya penduduk usia sekolah serta semakin banyak lembaga pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat/yayasan yang berdampak kepada bertambahnya jumlah daya tampung pada SD/MI dan SMP/MTs
 - Peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
 - Adanya program akreditasi sekolah;
 - Komitmen Pemkab. Lombok Tengah yang besar dalam dunia pendidikan inklusi yaitu mewajibkan sekolah umum untuk menerima pelajar berkebutuhan khusus;
 - Gerakan Masyarakat Penuntasan Tributa dan Pemungutan Siswa Putus Sekolah (Gempita Perpus) yang kegiatannya melibatkan Forpimda, Forpimka dan seluruh jajaran pendidikan.
 - Gerakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan termasuk kekerasan yang terjadi di sekolah
- b) Faktor penghambat
- Pertambahan jumlah lembaga PAUD belum dibarengi dengan peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan dan pelayanan
 - Tingginya komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat belum diikuti dengan kualitas manajemen penyelenggaraan dan pelayanan

III.1.7. SASARAN 6
TERSEDIANYA LAPANGAN PEKERJAAN BARU

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu: **“Tingkat pengangguran terbuka”**. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018*	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya (Tahun 2017)		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10

1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,77	5,37	3,08	147	143	3,32	144	LKj-IP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 Halaman : 24 Matrik Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 (BAPPEDA Kab. Lombok Tengah) Nomor : 10	Lintas OPD
Rata-rata						147 %	Kriteria 2018: SANGAT BAIK		144%	Kriteria 2017: SANGAT BAIK	

Sumber: LKj-IP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018

❖ Analisis :

Analisis/ perbandingan capaian target tahun 2018 dengan tahun 2017 tidak dapat dilakukan secara *up date* karena sampai dengan akhir penyusunan laporan ini tidak ada data tingkat pengangguran terbuka untuk Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh BPS.

Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin tinggi angka TPT maka jumlah pengangguran dalam angkatan kerja semakin banyak, yang berarti daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin buruk.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2014, 2015, dan 2017

Tahun	Angkatan Kerja				Bukan Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengang- guran*)	Jumlah	Sekolah	Mengu- rus RT	Lain- nya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2014	93,63	6,37	100,00	25,71	57,11	17,18	100,00
2015	92,58	7,42	100,00	26,41	57,86	15,73	100,00
2017	97,10	2,90	100,00	27,57	60,45	11,99	100,00

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2014, 2015 dan 2017
 Catatan: *) Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja biasanya disebut dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

❖ Pendukung/ hambatan:

Pencapaian kinerja yang “baik” didukung oleh beberapa hal antara lain:

1. Bertambahnya investasi didaerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika;
2. Adanya peningkatan jumlah kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;

- 3. Meningkatnya permintaan produk dari pemasaran secara online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah);
- 4. Tersedianya lapangan kerja di dalam dan luar negeri;
- 5. Pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK);
- 6. Peran pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

III.1.8. SASARAN 7
TERSEDIANYA JALAN DALAM KONDISI YANG MANTAP

Sasaran tersebut diukur dengan indikator “**prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap**”. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 7 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Prosentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi mantap	%	68,44	72,44	68,44	98%	94%	68,44 (554,30 Km)	100%	Laporan Kondisi jalan Dinas PUPR Tahun 2017	Dinas PUPR
Rata-rata						98%	Kriteria 2018: BAIK		100%	Kriteria 2017: BAIK	

Sumber: BAPPEDA Kab. Lombok Tengah dan LKj-IP Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.

- ❖ Analisis:
Analisis belum dapat dilakukan karena data tentang jalan dalam kondisi mantap Tahun 2018 belum dapat disampaikan karena Dinas PUPR sampai dengan saat laporan ini dibuat masih melakukan penyusunan laporan dan rekapitulasi data.
- ❖ Pendukung/ penghambat :
Adapun beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja dengan predikat “baik” antara lain:
 - 1. Komitmen kepala daerah yang sangat besar pada pemenuhan dan perbaikan inftrastruktur di daerah;
 - 2. Pembangunan infrastruktur terutama jalan dan irigasi merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah;
 - 3. Adanya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang intensif;
 - 4. Adanya data base jalan dan jembatan di Lombok Tengah.

III.1.9. SASARAN 8

TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA UTILITAS PERKOTAAN

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu: “**Cakupan Layanan Trayek Angkutan Kawasan Strategis Kabupaten yang Terlayani**”. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 8 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Cakupan Layanan Trayek Angkutan Kawasan Strategis Kabupaten yang Terlayani	Trayek	12	16	16	133%	100%	16	160%	Laporan Dinas Perhubungan Tahun 2018	DINAS PERHUBUNGAN
Rata-rata						133%	Kriteria 2018: SANGAT BAIK	160%	Kriteria 2017: SANGAT BAIK		

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah Tahun 2018.

❖ Analisis :

Capaian kinerja tahun 2018 sama dengan capaian kinerja Tahun 2017. Pada tahun 2018 tidak ada penambahan trayek angkutan baru yang ditetapkan. Meskipun demikian, capaian kinerja Tahun 2018 ini (16 trayek) telah memenuhi target jangka panjang lima tahunan (Tahun 2021) yakni sebanyak 16 trayek.

Berdasarkan analisis terhadap pertumbuhan kendaraan bermotor, perkembangan sarana prasarana fasilitas umum, pertumbuhan masyarakat khususnya pengguna transportasi umum serta kebijakan strategis pengembangan pariwisata di daerah, jumlah trayek yang telah ada saat ini dianggap telah cukup memadai. Kedepan yang perlu menjadi perhatian adalah pemberdayaan dan optimalisasi dari trayek-trayek yang telah ada saat ini agar optimal dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.

❖ Pendukung/ hambatan :

- Adapun beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja dengan predikat “baik” antara lain:
- a. Adanya sarana dan prasarana perhubungan yang cukup memadai;
 - b. Jumlah SDM yang cukup memadai;
 - c. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
 - d. Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan-kebijakan di bidang perhubungan;
 - e. Adanya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
 - f. Adanya kegiatan Pengamanan Keselamatan Transportasi Darat

- g. Adanya Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- h. Adanya kegiatan pengadaan rambu – rambu lalu lintas, marka jalan dan pengadaan pagar pengaman jalan.

III.1.10. SASARAN 9 MENURUNNYA LUASAN KAWASAN KUMUH

Sasaran tersebut diukur dengan indikator “**Kawasan kumuh perkotaan**”. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 9 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Kawasan Kumuh Perkotaan	Ha	92	80	70,39	123%	112%	70,39	128%	Laporan Dinas PERKIM Tahun 2018	Dinas PERKIM
Rata-rata						123%	Kriteria 2018: SANGAT BAIK	128%	Kriteria 2017: SANGAT BAIK		

Sumber : Dinas PERKIM Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

❖ Analisis :

Capaian kinerja tahun 2018 sama dengan capaian Tahun 2017. Pada tahun 2018 tidak ada perubahan terhadap kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Oleh karena itu upaya pengurangan jumlah kawasan kumuh harus dilakukan secara integratif dan sistematis melibatkan seluruh *stakeholders* secara aktif. Intervensi melalui program rehab rumah layak huni dan penataan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman tidak serta merta dapat merubah suatu wilayah menjadi tidak kumuh. Masih diperlukan intevensi dari sektor-sektor lain seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, demografi, ekonomi, ketentraman ketertiban dll.

❖ Pendukung/ penghambat:

Capaian kinerja yang “baik” pada sasaran ini antara lain didukung oleh:

- a. Adanya dokumen RTRW yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Program “kotaku” yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya / perilaku hidup bersih dan sehat;

- d. Adanya kegiatan penataan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat;
- e. Adanya kegiatan pembinaan komunitas perumahan.

III.1.11. SASARAN 10
TERCEGAH SEMAKIN MENURUNNYA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu: **“Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten (IKLH)”**. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 10 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten (IKLH)	Point	67,2	68,5	58,66	87%	86%	48,45	73%	Laporan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 Matrik Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 (BAPPEDA Kab. Lombok Tengah). Indikator nomor : 16.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Rata-rata						87%	Kriteria 2018: BAIK	73%	Kriteria 2017: SEDANG		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah Tahun 2018 dan BAPPEDA Kab. Lombok Tengah

❖ Analisis:

IKLH merupakan informasi kepada pengambil keputusan di tingkat daerah tentang kondisi lingkungan di daerah. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, IKLH juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan.

Kondisi IKLH Tahun 2018 dapat dikatakan lebih baik karena mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya (Tahun 2017: 48,45, Tahun 2018: 58,66). Peningkatan kinerja IKLH tahun 2018 menunjukkan upaya-upaya pelestarian dan penataan lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan cukup baik.

Adapun capaian indikator kinerja lain yang berkaitan dengan IKLH adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi 2016	Target Capaian Tahun 2018	Realisasi 2018)*	Target akhir RPJMD Tahun 2021
1	Cakupan layanan persampahan	%	13	14	20,11	20
2	Persentase Ketersediaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur	%	100	100	100	100
3	Cakupan titik pantau kualitas air, udara dan media lingkungan lainnya	%	17,35	44%	53%	85,22
4	Cakupan wilayah sumber mata air yang terkonservasi	Ha	16,98	30	16	30
5	Cakupan data/ informasi SDA dan LH	dokumen	25	2	2	2
6	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100
7	Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten (IKLH)	Point	NA	67	58,66	68,5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

❖ Pendukung/ penghambat:

Capaian kinerja yang “baik” pada sasaran ini antara lain didukung oleh:

- a. Adanya dokumen RTRW yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Penghijauan / penanaman pohon oleh pemerintah dan masyarakat;
- c. Penanganan sampah secara terpadu dengan melibatkan berbagai *stakeholders* seperti pemerintah desa/ kelurahan;
- d. Adanya NGO/ LSM yang peduli terhadap kesehatan lingkungan . Contoh komunitas hijau dll;
- e. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya / perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. Adanya kegiatan penataan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat;
- g. Adanya kegiatan pengawasan kondisi lingkungan.
- h. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara rutin berupa pengujian kualitas lingkungan di titik-titik yang telah ditetapkan sehingga didapatkan data sebagai bahan penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup
- i. Adanya sistem pengaduan masyarakat dimana masyarakat dapat menyampaikan masalah ataupun melaporkan kejadian/ masalah lingkungan yang terjadi di pemukimannya;

- j. Partisipasi aktif camat dan lurah dalam penataan lingkungan dan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

III.1.12. SASARAN 1 1
TERPENUHINYA KEBUTUHAN MASYARAKAT
TERHADAP DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu:

- 1. Tingkat Kepemilikan KTP
- 2. Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran
- 3. Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 11 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Tingkat Kepemilikan KTP	%	74,12	80,12	89,52	121%	112%	76,93	108%	LKJ-IP DISDUKCAPI Kab.Lombok Tengah Tahun 2018 (lampiran)	DISDUKCAPIL
2	Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	%	72,93	82,93	78,60	108%	95%	73,41	108%		
3	Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	%	85,23	93,23	86,15	101%	92%	78,10	96%		
Rata-rata						110%	Kriteria 2018: SANGAT BAIK	104 %	Kriteria 2017: SANGAT BAIK		

Sumber: LKj-IP DISDUKCAPIL Kab. Lombok Tengah Tahun 2018.

❖ Analisis :

Capaian kinerja sasaran Tahun 2018 (110%) lebih tinggi daripada Capaian kinerja Tahun 2017 (104%). Hal ini menunjukkan kemampuan DISDUKCAPIL dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah. Program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah adalah Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu dimana pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) serta penerapan KTP elektronik. Pada tahun 2018 telah dilakukan verifikasi data

kependudukan dan perekaman data oleh Kementerian Dalam Negeri.

❖ Pendukung/ hambatan:

Capaian kinerja sasaran mendapat predikat “baik” didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya adm. Kependudukan dan pencatatan sipil cukup tinggi;
- 2. Peningkatan kapasitas pengelola SIAK;
- 3. Adanya kegiatan pembuatan adm. Kependudukan dan pencatatan sipil keliling;
- 4. Dukungan dan partisipasi kantor camat dalam pelaksanaan perekaman dan pembuatan adm. Kependudukan dan pencatatan sipil.

III.1.13. SASARAN 12
TERWUJUDNYA PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator yaitu: “**laju pertumbuhan penduduk**”.Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 12 Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,02	1,00	1,1	92 %	90%	1,13	102%	LKjIP DP3AP2KB Halaman 35	DP3AP2KB
Rata-rata						92 %	Kriteria 2018: BAIK	102%		Kriteria 2017: SANGAT BAIK	

Sumber : LKjIP BP3AP2KB Lombok Tengah Tahun 2018

❖ Analisis :

Pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometric dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan adalah metode geometrik. Manfaat menghitung laju pertumbuhan penduduk adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

❖ Pendukung/ hambatan:

Capaian kinerja sasaran yang mendapat predikat “baik” didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Adanya program pelayanan kontrasepsi bagi pasangan suami istri;

- Adanya pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
- Sosialisasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- Adanya tenaga pendamping kelompok bina keluarga.
- Tingkat kesadaran masyarakat tentang program keluarga berencana yang semakin tinggi.

III.1.14. SASARAN 13
 TERWUJUDNYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN PERTAMA

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator yaitu: “rata-rata usia kawin pertama”. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 13 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Rata-rata usia kawin Pertama Perempuan	Tahun	20,4	21	19,67	96%	94%	19,98	99%	LKJ-IP DP3AP2KB Tahun 2018 Halaman: 42 Matrik Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 (BAPPEDA Kab. Lombok Tengah). Indikator nomor : 19	DP3AP2KB
Rata-rata						96 %	Kriteria 2018: BAIK	99 %	Kriteria 2017: BAIK		

Sumber : LKJ-IP DP3AP2KB Kab. Lombok Tengah Tahun 2018 dan BAPPEDA Kab.Lombok Tengah Tahun 2018

- ❖ Analisis :
 Pencapaian indikator ini lebih tinggi daripada capaian tahun kinerja Tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui DP3AP2KB dalam melaksanakan berbagai upaya (program/kegiatan) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menunda perkawinan bagi para perempuan.
- ❖ Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2018 :
 Pendukung : Adanya Komitmen dari Pemerintah Daerah melalui BP2KB untuk menggencarkan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan melalui berbagai media dan forum-forum pertemuan lintas sektor.
 Penghambat :
 a. Budaya/Adat Istiadat (di Pulau Lombok kalau anak remaja keluar rumah sampai dengan waktu-waktu tertentu, maka diharuskan kawin dengan teman laki-laki yang mengajaknya keluar).

- b. Masih terbatasnya jumlah siswa-siswi di SLTP/SLTA, baik jalur agama maupun jalur umum yang sudah menerima sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan.
- c. Terbatasnya Lapangan Pekerjaan.
- d. Belum optimalknya penyampain Advokasi-KIE Pendewasaan Usia Perkawinan kepada masyarakat.

II.1.15. SASARAN 14
TERWUJUDNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu “**Jumlah Koperasi berkualitas**”. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 15
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 14 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Jumlah Koperasi berkualitas	Unit	325	345	330	102%	96%	345	110%	Laporan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lombok Tengah Tahun 2018	Dinas Koperasi UKM
Rata-rata						102%	Kriteria 2018: SANGAT BAIK	110%	Kriteria 2017: SANGAT BAIK		

Sumber : Laporan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

- ❖ Analisis :
 Capaian kinerja pada tahun 2018: 330 unit mengalami penurunan 15 unit atau 4 % dibandingkan dengan tahun 2017 : 345 unit. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun capaian kinerja tahun 2018 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dewasa ini, kesadaran dan pemahaman tentang koperasi semakin meningkat di masyarakat. Kondisi ini didukung dengan upaya-upaya pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan Pemerintah Lombok Tengah merupakan hal-hal yang pedukung pencapaian di tahun 2018 ini.
- ❖ Pendukung/ hambatan:
 Capaian kinerja dengan predikat “baik” pada sasaran ini antara lain didukung oleh:
 1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi;
 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat berkoperasi;
 3. Adanya pembinaan dan pendampingan yang intensif terhadap koperasi di daerah;
 4. Pelatihan/ diklat peningkatan kapasitas SDM koperasi di daerah;

5. Dinamika dan permasalahan sosial kemasyarakatan yang kompleks, terutama pada aspek ekonomi memerlukan wadah berupa koperasi untuk dapat melakukan perbuatan/ tindakan ekonomi secara terorganisir dan lebih produktif.

III.1.16. SASARAN 15
TERSEDIANYA SDM UMKM DAN APARATUR YANG BERKOMPETEN

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu “Jumlah UMKM”. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 16.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 15 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Jumlah UMKM	Unit	156.977	157.977	158.511	101%	100%	158.096	101%	Laporan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lombok Tengah Tahun 2018	Dinas koperasi dan UKM
Rata-rata						101%	Kriteria 2018: SANGAT BAIK		100%	Kriteria 2017: BAIK	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

❖ Analisis :

Pada indikator ini perlu dibedakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha dengan modal usaha 0 (nol) sampai dengan 50 juta dengan volume penjualan adalah sebesar 300 juta/ tahun, sedangkan usaha kecil adalah usaha dengan modal 50 jt s/d 500 jt dengan volume penjualan mulai dari 300 juta sampai 2,5 milyar/tahun. Usaha Menengah adalah usaha dengan modal 500 juta sampai dengan 10 Milyar dengan volume penjual sebesar 2,5 milyar sampai dengan 50 Milyar/tahun.

Untuk mengetahui perkembangan UMKM di Kab. Lombok Tengah, Dinas Koperasi dan UKM telah melakukan program pemeringkatan dengan menggunakan kertas kerja pemeringkatan. Kertas kerja ini berfungsi melakukan *cross check* terhadap peningkatan UMKM tersebut meliputi peningkatan modal usaha, jumlah penjualan pertahun, jumlah tenaga kerja dan hal-hal lainnya. Selain itu kami juga melakukan pendampingan melalui pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi bantuan alat kerja dan permodalan. Namun demikian, kendala yang dihadapi di lapangan adalah keterbatasan jumlah SDM yang mampu memberikan

pendampingan terhadap UMKM yang mengalami pertumbuhan pesat di Kabupaten Lombok Tengah.

❖ Pendukung/ Hambatan :

Capaian kinerja yang “baik” pada sasaran ini antara lain didukung oleh:

- 1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM di daerah;
- 2. Meningkatnya semangat enterpreneurship masyarakat;
- 3. Fasilitasi promosi produk UMKM dalam pelaksanaan pameran-pameran dan event-event regional/ nasional;
- 4. Peningkatan kualitas dan kemudahan dalam perizinan;
- 5. Adanya pembinaan dan pendampingan yang intensif terhadap UMKM di daerah;
- 6. Pelatihan/ diklat peningkatan kapasitas SDM UMKM di daerah

III.1.17. SASARAN 16
TERSEDIAANYA TEKNOLOGI PERTANIAN

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu “**Produksi Komoditas Pangan (padi)**”. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 17.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 16 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Produksi Komoditas Pangan (padi)	Ton/ Tahun	489.357	504.147	527.796	108%	105%	501.706	104%	LKJ-IP Dinas Pertanian Tahun 2018. Bab III	Dinas Pertanian
Rata-rata						108%	Kriteria 2018: SANGAT BAIK	104%	Kriteria 2017: SANGAT BAIK		

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

❖ Analisis :

Produksi komoditas padi adalah jumlah produksi padi yang dihasilkan oleh masyarakat petani selama 1 (satu) tahun. Sebagai bahan makanan pokok, beras adalah komoditi pertanian yang harus tetap dijaga ketersediaannya di masyarakat. Oleh karena itu tingkat produksi padi di daerah harus terus ditingkatkan.

Jumlah Produksi tahun 2018 sebanyak Rp. 527.796 ton/ tahun, lebih tinggi dari Tahun 2017 sebanyak Rp. 501.706 ton/ tahun.



Pendukung/ hambatan:

Adapun beberapa hal yang mendukung capaian kinerja produksi padi dengan perdikat “baik” di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- 1. Kondisi geografis dan luas areal pertanian di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar. Bahkan Lombok Tengah merupakan salah satu daerah lumbung pangan terutama komoditi padi;
- 2. Upaya intensifikasi pertanian secara modern yang didukung dengan penyuluhan yang intensif;
- 3. Pembentukan kelompok-kelompok tani di masyarakat;
- 4. Pemberian bantuan bibit dan peralatan pertanian kepada kelompok tani;
- 5. Penyediaan bibit-bibit unggulan pertanian (tanaman/ hewan);
- 6. Adanya kegiatan pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi;
- 7. Adanya kegiatan pengelolaan produksi tanaman sereal.

III.1.18. SASARAN 17
TERWUJUDNYA POLA KONSUMSI PANGAN YANG BERAGAM

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu “**Pola Pangan Harapan**”. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 18.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 17 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisas	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Pola Pangan Harapan	Point	86,30	87,30	85,5	99%	98%	86,2	100%	LKJ-IP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 Halaman 29	Dinas Ketahanan Pangan
Rata-rata						99%	Kriteria 2018: BAIK	100%	Kriteria 2017: BAIK		

Sumber : LKJ-IP Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah Tahun 2018



Analisis :

Tingkat keragaman dan mutu gizi konsumsi pangan penduduk baik nabati maupun hewani sudah cukup baik, dan perkembangan skor PPH tersebut menunjukkan adanya indikasi perbaikan diversifikasi pola konsumsi pangan ke arah yang lebih baik. Peningkatan PPH tersebut, karena didukung oleh peningkatan ketersediaan pangan yang pada dasarnya dilakukan secara intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi serta pengembangan komoditas lainnya melalui Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan.

❖ Pendukung/ hambatan:

Capain kinerja “baik” pada sasaran ini antara lain didukung oleh:

1. Ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas;
2. Varietas/ jenis tanaman pangan yang beragam/ variatif;
3. Sosialisasi dan penyuluhan yang intensif;
4. Program pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat;
5. Pembangunan lumbung-lumbung pangan oleh pemerintah daerah;
6. Adat budaya masyarakat yang bersifat agraris dan telah mempraktekkan sistem ketahanan pangan sejak dahulu. Hal ini tercermin dari bentuk bangunan khas masyarakat sasak berupa lumbung padi tempat menyimpan hasil-hasil pertanian.

III.1.19. SASARAN 18
TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA YANG MEMADAI

Sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu

1. Rata-rata Lama Tinggal wisatawan;
2. Jumlah wisatawan domestik;
3. Jumlah wisatawan mancanegara.

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 19.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 18 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Rata-rata Lama Tinggal wisatawan	Hari	3,65	4,04	3	82%	74%	3,50	101%	Matrik Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 (BAPPEDA Kab. Lombok Tengah). Indikator nomor : 26, 27 LKjIP Dinas ParBud Tahun 2018, Halaman: 27	Dinas PARBUD
2	Jumlah wisatawan domestik	Orang	72.274	90.660	70539	115%	92%	86.524	134%		
3	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	62.435	75.546	83176	113%	93%	113.961	201%		
Rata-rata						103 %	Kriteria 2018: SANGAT BAIK	145 %	Kriteria 2017: SANGAT BAIK		

Sumber : BAPPEDA Kab. Lombok Tengah Tahun 2018 dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah.

❖ Analisis:

Capaian kinerja sasaran tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai Tahun 2018 telah melebihi target (103%). Namun, jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 (145%) maka capain kinerja Tahun 2018 ini mengalami penurunan sebesar 42%. Penurunan yang cukup besar ini disebabkan karena terjadi penurunan capaian pada 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana disampaikan pada tabel diatas. Meskipun mengalami penurunan capaian kinerja, namun capaian kinerja Tahun 2018 untuk sasaran ini mampu mencapai predikat “baik” karena Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tetap melaksanakan dialog budaya, fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah, fasilitasi penyelenggraan festival budaya daerah serta terus berupaya menimbulkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah.

❖ Pendukung/ hambatan:

Capain kinerja sasaran dengan predikat “baik” pada sasaran ini antara lain didukung oleh:

1. Komitmen dan kebijakan pemerintah kabupaten yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan/ prioritas daerah;
2. Penetapan daerah kuta sebagai KEK Mandalika yang memberi dampak positif terhadap pengembangan pariwisata di daerah;
3. Intensitas promosi wisata oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang cukup tinggi;
4. Obyek wisata alam dan budaya yang menarik;
5. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
6. Adanya event nasional maupun lokal yang dilaksanakan di Lombok Tengah. Contoh: event bau nyale, seminar/ pertemuan nasional dan internasional, pelaksanaan lomba/ pertandingan skala nasional/ internasional
7. Keberadaan Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu masuk utama di NTB;
8. Adanya fasilitasi kegiatan seni budaya masyarakat;
9. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal. Contoh : pembentukan desa-desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah

III.1.20. SASARAN 19
TERWUJUDNYA PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu “**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**” Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 20.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 19 Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	32.206,46	34.002,17	73.341,14	228%	216%	98.594,08	315%	Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018	Dinas LUTKAN
Rata-rata						228 %	Kriteria 2018: SANGAT BAIK		315 %	Kriteria 2017: SANGAT BAIK	

Sumber : BAPPEDA Kab. Lombok Tengah Tahun 2018 dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Tengah.

❖ Analisis :

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan produksi perikanan tahun 2018 yaitu melalui penambahan input produksi, perluasan pemanfaatan potensi, penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan budidaya serta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

❖ Pendukung/ hambatan:

Capaian kinerja dengan predikat “baik” pada sasaran ini antara lain didukung oleh:

1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan perikanan;
2. Potensi pasar/ minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan cukup besar;
3. Adanya pembinaan yang intensif terhadap peternak/ pembudidaya ikan di daerah;
4. Sosialisasi/ pelatihan/ diklat peningkatan kapasitas SDM bagi peternak/ pembudidaya ikan di daerah. Contoh sosialisasi dalam bentuk lomba memasak serba ikan;
5. Penyediaan bibit-bibit ikan unggul;
6. Pemberian bantuan bibit ikan dan peralatan budidaya perikanan.

III.1.21. SASARAN 20

TERSEDIANYA SARANA PRASARANA IKM YANG MEMADAI

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu “Unit Usaha Pengolahan Pangan dengan Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)” Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 21.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 20 Tahun 2018.

no	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	8	9	10
1	Unit Usaha Pengolahan Pangan dengan Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	unit	190	240	256	135%	107%	215	130%	Laporan Dikes Lombok Tengah Tahun 2018	Dinas Kesehatan
Rata-rata						135%	Kriteria 2018: SANGAT BAIK	130 %	Kriteria 2017: SANGAT BAIK		

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

❖ Analisis :

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP. SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Tujuan pemberian SIPPIRT adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan Izin untuk melakukan kegiatan Industri Rumah Tangga Pangan yang telah mengikuti SPP-IRT dalam rangka terwujudnya tertib administrasi dan kepastian hukum.
- b. Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kesehatan pangan.
- c. Melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia.
- d. Sebagai pedoman bagi Industri Rumah Tangan (IRT) untuk menilai dan mengkaji segala bentuk tuntutan masyarakat selaku konsumen terhadap pangan yang diproduksi.

❖ Pendukung/ hambatan:

Capaian kinerja dengan predikat “ baik” pada sasaran ini di dukung oleh:

1. Kegiatan penyuluhan tentang sertifikasi produksi PIRT kepada para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya;
2. Pangsa pasar yang begitu besar karena Lombok Tengah merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk yang cukup besar;
3. Adanya kegiatan peningkatan kapasitas laboratorium, pengawasan obat dan makanan
2. Adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

III.1.22. SASARAN 2 1
TERWUJUDNYA KAPASITAS KEUANGAN DAERAH YANG MEMADAI

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu “**Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)**” Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 22.
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 1 Tahun 2018.

no	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Target 2021	Realisasi 2018	%	%	Kondisi Tahun Sebelumnya (tahun 2017)		Dokumen Pendukung	OPD Penanggung jawab
								realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	7	7	9	10
1	Target PAD	Rp	168.959.227.045,74	179.995.502.490,71	178.106.760.604,63	105%	99%	283.829.649.219,14	173%	LKj-IP Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018, Hal 30	BAPENDA
Rata-rata						105 %	Kriteria 2018: SANGAT BAIK	173 %		Kriteria 2017: SANGAT BAIK	

Sumber : LKj-IP Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

❖ Analisis :

Capaian indikator target PAD dengan tahun 2018 telah melampaui target. Pada tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar Rp 168.959.227.045,74 dapat dicapai sebesar Rp 178.106.760.604,63 atau 105 %. Namun kondisi ini menunjukkan penurunan PAD dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 reaslisasi PAD sebesar Rp 283.829.649.219,14. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah terutama pada sektor pendapatan. Penurunan perolehan PAD akan berdampak signifikan pada kemampuan keuangan daerah dalam melakukan program dan kebijakan. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kajian mendalam dan fokus pada potensi-potensi PAD beserta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan potensi-potensi PAD tersebut. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat dan sumberdaya (terutama SDM) dalam melakukan kajian dan pemberdayaan terhadap potensi-potensi PAD di daerah.

❖ Pendukung / hambatan :

- a. Tiap - tiap OPD berusaha maksimal untuk mencapai targetnya.
- b. Setiap bulannya dilakukan Rekonsiliasi dan koordinasi dengan OPD pengelola PAD.
- c. Adanya perjanjian kinerja tiap – tiap OPD
- d. Melakukan sosialisasi dengan pihak pengusaha (WP dan WR), pihak aparat pemerintahan Kecamatan, Kelurahan/Desa, kadus/ kaling
- e. Melakukan uji petik setiap bulannya terhadap obyek pajak hotel dan pajak restoran dikawasan wisata
- f. Melakukan Monetoring dan evaluasi
- g. Melakukan pertemuan dengan Notaris (BPHTB)
- h. Melakukan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan instansi terkait (POL PP, BPMP2T, Kepolisian,Kejaksaan dan BPKP)
- i. Melakukan Reklas (penyesuaian) NJOP PBB-P2
- j. Penetapan daerah kuta sebagai KEK Mandalika yang memberi dampak positif terhadap pengembangan pariwisata dan pendapatan asli daerah di daerah;
- k. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sehingga mendukung penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian di daerah;
- l. Perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah yang semakin maju seperti penambahan jumlah UMKM, wirausaha baru dan pertumbuhan pariwisata.

Sedangkan penghambat pencapaian target PAD tahun 2017 adalah :

- a. Tingkat kepatuhan WP relatif masih rendah terutama hotel melati/homestay.
- b. Keterbukaan WP terhadap omzet penerimaan rendah
- c. Penggunaan BILL yang dapat menunjukkan hak pemerintah tentang TAX atau yang mencantumkan pajak masih belum optimal.
- d. WP mengeluhkan tingkat keamanan dan kenyamanan yang rendah menyebabkan tamu/konsumen tinggal sebentar.
- e. Masih banyaknya SPPT PBB P2 yang bermasalah.
- f. Pengakuan WP terhadap harga transaksi tanah cenderung lebih rendah dari harga transaksi yang sebenarnya.
- g. Belum ada paying hukum yang menjelaskan aturan apakah hotel dan restoran yang tidak memiliki izin operasi dan izin lokasi untuk penarikan pajaknya.

III.2. REALISASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran

2018 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 3).

Pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2018 diarahkan pada upaya penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel ditekankan pada adanya sistem dan prosedur yang menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, melalui penetapan perangkat hukum yang menjadi landasan yuridis formal, antara lain; penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Disiplin

Disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan pemahaman pada kaidah-kaidah hukum yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga senantiasa berlandaskan pada azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

3. Keadilan

Keadilan pengelolaan keuangan daerah ditekankan pada upaya pengaturan secara lebih proporsional dalam setiap proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah mencerminkan tata kelola yang tanpa diskriminasi.

4. Efisiensi dan Efektifitas

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif diarahkan pada upaya penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, indikator yang ingin dicapai serta penetapan prioritas kegiatan dan penetapan harga satuan yang rasional.

5. Berbasis Kinerja

Pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja merupakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/output*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Hasil dan manfaat yang dicapai merupakan kesesuaian antara perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut secara konsekuen diharapkan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 pada tanggal 20Desember 2017dengan struktur sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Struktur APBD Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.972.157.047.264,50
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	180.965.018.718,50
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	59.774.538.834,50
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	22.797.578.969,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.278.150.000,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87.114.750.915,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.453.038.384.000,00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	79.925.787.000,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	985.217.157.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	387.895.440.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	338.153.644.546,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	93.418.085.000,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	72.811.159.546,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	171.924.400.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.972.157.047.264,50
5.	BELANJA DAERAH	2.052.116.047.264,50
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.168.029.375.544,50
5.1.1.	Belanja Pegawai	854.714.602.899,50
5.1.2.	Belanja Bunga	2.291.975.445,00
5.1.4.	Belanja Hibah	33.011.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.323.691.000,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.257.211.800,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik	264.430.694.400,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	884.086.671.720,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	59.289.484.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	431.819.754.563,00
5.2.3.	Belanja Modal	392.977.433.157,00
	JUMLAH BELANJA	2.052.116.047.264,50
	SURPLUS/(DEFISIT)	(79.959.000.000,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	79.959.000.000,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	79.959.000.000,00
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	79.959.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	79.959.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	79.959.000.000,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Selanjutnya pada perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 selama satu semester berjalan mengalami berbagai dinamika yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi struktur APBD dan penatausahaannya.Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat;
5. Keadaaan luar biasa.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja dalam pelaksanaan APBD

Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD; perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2018, serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Adapun substansi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian struktur APBD baik pada sisi pendapatan maupun belanja, antara lain:

1. Peningkatan dan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah pada beberapa objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (PT. Bank NTB, PD. BPR LKP dan PT. Jamkrida NTB Bersaing) berdasarkan hasil RUPS tahun 2017, peningkatan target lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bersumber dari penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito.
2. Penyesuaian besaran target dana perimbangan, meliputi: Penyesuaian besaran target yang bersumber dari DBH-CHT berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor 525.23-1020 Tahun 2017.
3. Peningkatan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi serta pengurangan target Bagi Hasil Pajak Permukaan.

serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tertanggal 28 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD yang mengamanatkan bahwa Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dianggarkan pada Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Hibah, Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS dan Rincian Obyek Dana BOS.

- 4. Pergeseran anggaran antar organisasi perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang disebabkan capaian target kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD.
- 5. Pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil audit BPK dan tambahan target dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, yang harus dialokasikan dalam belanja pada perubahan APBD baik yang penggunaannya diarahkan/ bersifat mengikat maupun bersifat umum.
- 6. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target kinerja RPJMD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
- 7. Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, seperti: pengalokasian Pendapatan Dana BOS dalam Belanja Daerah.

Dengan adanya beberapa hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018, diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan Nomor 905/175/DPRD dan 932/316/BPKADtentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA Perubahan) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) dengan Nomor 905/176/DPRD dan 932/317/BPKAD yang disepakati tanggal 31 Juli 2017. Selanjutnya diikuti dengan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018sampai dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor3Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 15 Oktober 2018, yang secara strukturebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 24.
Struktur Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.972.157.047.264,50	2.000.817.203.189,17	28.660.155.924,67
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	180.965.018.718,50	194.640.639.337,17	13.675.620.618,67
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	59.774.538.834,50	67.423.937.254,50	7.649.398.420,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	22.797.578.969,00	22.948.818.969,00	151.240.000,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.278.150.000,00	9.153.132.198,67	(2.125.017.801,33)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87.114.750.915,00	95.114.750.915,00	8.000.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.453.038.384.000,00	1.460.212.041.000,00	7.173.657.000,00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	79.925.787.000,00	83.317.644.000,00	3.391.857.000,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	985.217.157.000,00	985.217.157.000,00	0,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	387.895.440.000,00	391.677.240.000,00	3.781.800.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	338.153.644.546,00	345.964.522.852,00	7.810.878.306,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	93.418.085.000,00	93.418.085.000,00	0,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	72.811.159.546,00	80.622.037.852,00	7.810.878.306,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	171.924.400.000,00	171.924.400.000,00	0,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.972.157.047.264,50	2.000.817.203.189,17	28.660.155.924,67
5.	BELANJA DAERAH	2.052.116.047.264,50	2.180.147.657.905,96	128.031.610.641,46
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.168.029.375.544,50	1.171.793.722.570,96	3.764.347.026,46
5.1.1.	Belanja Pegawai	854.714.602.899,50	838.203.926.002,61	(16.510.676.896,89)
5.1.2.	Belanja Bunga	2.291.975.445,00	0,00	(2.291.975.445,00)
5.1.4.	Belanja Hibah	33.011.200.000,00	44.643.000.000,00	11.631.800.000,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.323.691.000,00	13.639.640.846,00	9.315.949.846,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.257.211.800,00	9.037.275.622,35	780.063.822,35
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik	264.430.694.400,00	264.769.880.100,00	339.185.700,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	884.086.671.720,00	1.008.353.935.335,00	124.267.263.615,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	59.289.484.000,00	62.070.824.500,00	2.781.340.500,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	431.819.754.563,00	500.168.206.655,46	68.348.452.092,46
5.2.3.	Belanja Modal	392.977.433.157,00	446.114.904.179,54	53.137.471.022,54
	JUMLAH BELANJA	2.052.116.047.264,50	2.180.147.657.905,96	128.031.610.641,46
	SURPLUS/(DEFISIT)	(79.959.000.000,00)	(179.330.454.716,79)	(99.371.454.716,79)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	79.959.000.000,00	179.330.454.716,79	99.371.454.716,79
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	79.959.000.000,00	179.330.454.716,79	99.371.454.716,79
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	0,00	99.371.454.716,79	99.371.454.716,79
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	79.959.000.000,00	79.959.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	79.959.000.000,00	179.330.454.716,79	99.371.454.716,79
	PEMBIAYAAN NETTO	79.959.000.000,00	179.330.454.716,79	99.371.454.716,79
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan satu kesatuan atau bagian integral dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disamping belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara garis besar komponen pendapatan daerah dapat dikelompokkan atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah secara khusus dalam konteks penganggaran menjadi sebuah instrumen untuk menilai tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Adapun secara umum pendapatan daerah mencerminkan *performance* perekonomian suatu daerah yang bisa menggambarkan kemampuan finansial, tingkat investasi dan *income* perkapita di daerah.

Dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sejalan dengan hal tersebut maka penetapan besaran target pada masing-masing sumber pendapatan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan potensi pendapatan yang ada.

Sebagai pedoman dalam pengelolaan pendapatan daerah maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan arah kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 meliputi :

1. Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan azas keadilan (*equity*) memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya Pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PBB), hasil guna (*efficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
3. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.

4. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi.
5. Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan.
6. Melakukan pendataan serta pemutakhiran data terhadap wajib pajak PBB yang merupakan salah satu komponen pendapat asli daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah.
7. Mencari obyek bagi sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan. Dalam pemungutan obyek baru tersebut diupayakan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional.
8. Menumbuh kembangkan iklim yang sehat di BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.
9. Untuk dana perimbangan dilakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.
10. Dari sisi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Lombok Tengah akan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
11. Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Selanjutnya rencana upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah, meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, antara lain :

- a. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah untuk membayar kewajiban pajak dan retribusinya dengan menerapkan kebijakan sanksi (*punishment*) dan imbalan (*reward*) secara konsisten dan berkelanjutan.
- b. Melakukan pembenahan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah terutama penatausahaan dan pengadministrasian serta menerapkan audit juru pungut secara berkala.
- c. Mengoptimalkan operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- d. Merancang sistem berbasis teknologi informasi dalam pemrosesan data dan potensi Pendapatan Asli Daerah.
- e. Melakukan revisi terhadap Perda pajak dan retribusi daerah yang tidak relevan lagi.

b. Dana Perimbangan

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan, antara lain :

- a. Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan kementerian teknis dan Pemerintah Provinsi terkait dengan pembagian atas alokasi dana Bagi Hasil Bukan Pajak seperti; Bagi Hasil Pertambangan Umum (*royalty*), *landrent* dan bagi hasil perikanan.
- b. Meningkatkan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi atas proses waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar penyaluran dananya dapat tepat waktu.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain:

- a. Menyusun database potensi daerah yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dengan domisili di Kabupaten Lombok Tengah untuk menetapkan bagian daerah bagi hasil PKB, BBNKB dan PBBKB.
- b. Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (KPPRD) untuk melakukan *sweeping* atas kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan.
- c. Melakukan inventarisasi ijin pemakaian air bawah tanah dan permukaan sebagai dasar alokasi bagi hasil pajak pemakaian air bawah tanah dan

permukaan.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Adapun target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.000.817.203.189,17. Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesarRp1.980.500.525.597,81 atau 98,98%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. 25.
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.000.817.203.189,170	1.980.500.525.597,810	98,98
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	194.640.639.337,170	187.324.323.969,810	96,24
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	67.423.937.254,50	68.570.515.135,41	101,70
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	22.948.818.969,00	13.543.930.700,00	59,02
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.153.132.198,670	9.351.612.387,200	102,17
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.114.750.915,000	95.858.265.747,200	100,78
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.460.212.041.000,000	1.449.014.029.739,000	99,23
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	83.317.644.000,00	84.263.046.837,00	101,13
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	985.217.157.000,00	985.217.157.000,00	100,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	391.677.240.000,00	379.533.825.902,00	96,90
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	345.964.522.852,00	344.162.171.889,00	99,48
4.3.1.	Pendapatan Hibah	93.418.085.000,00	93.490.949.400,00	100,08
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	80.622.037.852,00	78.308.522.693,00	97,13
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	171.924.400.000,00	171.944.598.000,00	100,01
4.3.6.	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	418.101.796,00	0,00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Hasil Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp67.423.937.254,50 dan realisasi yang mampu dicapai sebesar Rp68.570.515.135,41 atau 101,70%.Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pajak daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 26.
Realisasi Hasil Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.1.01.	Pajak Hotel	7.774.955.000,00	8.151.261.407,00	104,84
4.1.1.02.	Pajak Restoran	8.042.665.393,00	9.603.359.493,00	119,41
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	162.739.000,00	196.369.887,00	120,67
4.1.1.04.	Pajak Reklame	552.277.061,50	652.516.464,00	118,15
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	15.872.369.000,00	17.925.707.178,00	112,94
4.1.1.07.	Pajak Parkir	1.857.496.000,00	2.160.048.619,00	116,29
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	225.900.000,00	124.983.600,00	55,33
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	17.250.000,00	172,50
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.050.000.000,00	1.114.370.644,00	106,13
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	21.710.078.800,00	15.500.399.783,41	71,40
4.1.1.13.	Pajak PBHTB	10.165.457.000,00	13.124.248.060,00	129,11
	JUMLAH	67.423.937.254,50	68.570.515.135,41	101,70

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Hasil Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp22.948.818.969,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.13.543.930.700,00 atau 59,02%.Lebih rinci target dan realisasi retribusi daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 27.
Realisasi Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	18.578.397.709,00	8.840.431.700,00	47,58
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.440.151.260,00	1.865.336.350,00	76,44
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.930.270.000,00	2.838.162.650,00	147,03
	JUMLAH	22.948.818.969,00	13.543.930.700,00	59,02

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.153.132.198,67 dan terealisasi sebesar Rp9.351.612.387,20 atau 102,17 %.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu yang berasal berasal dari deviden PT. Bank NTB Cabang Praya, PD. BPR NTB Cabang Lombok Tengah dan PT. Jamkrida NTB.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 mempunyai target sumber pendapatan lainnya pada kelompok Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp95.114.750.915,00. Adapun capaian realisasinya sebesar Rp95.858.265.747,20 atau 100,78 %.Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 27.

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	340.568.000,00	72.457.100,00	21,28
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	3.700.000.000,00	3.207.965.351,76	86,70
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito	13.500.000.000,00	8.371.140.705,99	62,01
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	1.101.556.581,43	0,00
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	248.585.811,35	0,00
4.1.4.09.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	170.057.729,00	0,00
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	520.914.209,31	0,00
4.1.4.16.	Pendapatan dari BLUD	51.374.448.915,00	56.843.042.403,76	110,64
4.1.4.18.	Penerimaan Lain-lain	0,00	60.357.332,60	0,00
4.1.4.22.	Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP	25.924.734.000,00	25.262.188.522,00	97,44

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.4.24.	Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga	275.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	95.114.750.915,00	95.858.265.747,20	100,78

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terealisasi sebesar 99,23% atau sebesar Rp1.449.014.029.739,00 dari target anggaran sebesar Rp1.460.212.041.000,00.

1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Adapun target pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2018sebesar Rp83.317.644.000,00.Dari target tersebut realisasi yang dicapai yakni sebesar Rp84.263.046.837,00 atau 101,13% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasinya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 28.
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	60.489.724.000,00	58.959.173.059,00	97,47
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	6.684.141.000,00	7.425.858.068,00	111,10
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri	426.176.000,00	458.718.945,00	107,64
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	41.604.693.000,00	41.641.222.888,00	100,09
4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	11.774.714.000,00	9.433.373.158,00	80,12
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	22.827.920.000,00	25.303.873.778,00	110,85
4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	16.586.000,00	25.407.025,00	153,18
4 . 2 . 1 . 02 . 03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	0,00	130.156,00	0,00

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	21.868.307.000,00	24.477.917.335,00	111,93
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	800.419.262,00	84,88
	JUMLAH	83.317.644.000,00	84.263.046.837,00	101,13

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp985.217.157.000,00 terealisasi sebesar anggaran yang ditargetkan atau 100%.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp391.677.240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp379.533.825.902,00 atau 96,90%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan hibah ditargetkan sebesar Rp93.418.085.000,00. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp93.490.949.400,00 atau 100,08 %. Pendapatan hibah dari Pemerintah merupakan Program Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas pertanian beririgasi di Kabupaten Lombok Tengah dan hibah Program Pengolahan air limbah setempat senilai Rp355.189.400,00 dan hibah dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP senilai Rp93.135.760.000,00.

2) Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp80.622.037.852,00. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp78.308.522.693,00 atau 97,13%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. 29.

Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	14.304.735.000,00	13175868968	92,11
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.037.991.100,00	14.168.917.528,00	108,67
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.406.980.325,00	18.084.627.619,00	103,89
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	53.900.000,00	85.583.413,00	158,78
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	35.818.431.427,00	32.793.525.165,00	91,55
	JUMLAH	80.622.037.852,00	78.308.522.693,00	97,13

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2018 merupakan pendapatan yang bersumber dari Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Adapun Target pendapatan yang bersumber dari dana penyesuaian tersebut adalah sebesar Rp171.924.400.000,00, dari target tersebut terealisasi sebesar Rp171.944.598.000,00 atau 100,01%, sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 30.

Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.3.4.01.03.	Dana Insentif Daerah	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	100
4.3.4.01.06.	Dana Desa	155.424.400.000,00	155.444.598.000,00	100,01
	JUMLAH	171.924.400.000,00	171.944.598.000,00	100,01

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

4) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi

Untuk tahun anggaran 2018 tidak ada Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

3. Permasalahan dan Solusi

Pendapatan daerah yang ditargetkan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2018realisasinya mencapai 98,98%. Tidak tercapainya target ini disebabkan masih ada beberapa sumber pendapatan daerah yang tidak mampu mencapai target, jenis pendapatan daerah yang tidak mencapai target adalah Pendapatan Retribusi Daerah. Untuk jenis Pendapatan Retribusi Daerah terjadi pada objek pendapatan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, hampir terjadi pada seluruh rincian objek pendapatannya, terutama yang bersumber dari Pendapatan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang tidak terealisasi di tahun 2018,Retribusi Pelayanan Parkirdi tepi jalan umum mencapai 26,62%, Retribusi Pelayanan Pasar mencapai 20,75%,Retribusi Rumah Potong Hewan mencapai 22,96,%, retribusi tempat rekreasi dan olah raga mencapai 30,21%,dan Retribusi Terminal yang tidak terealisasi di tahun 2018, dari target yang telah ditetapkan serta beberapa pendapatan lainnya yang capaiannya dibawah 50%.Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018, antara lain:

- a. Pengelolaan administrasi Pendapatan Asli Daerah terutama terkait pengelolaan retribusi daerah pada SKPD relatif masih belum terlaksana dengan tertib.
- b. Masih rendahnya kinerja pengelola retribusi daerah sehingga berdampak pada rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang telah ditargetkan di beberapa SKPD. Rendahnya kinerja ini disebabkan oleh masih kurangnya kuantitas dan kualitas pengawasan
- c. Belum diterapkannya penegakan hukum (*law inforcement*) terhadap wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak patuh membayar pajak/retribusi daerah. Akibatnya wajib pajak/retribusi tersebut tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak/retribusi.
- d. Penetapan peraturan yang mengatur besarnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah baik dari dana perimbangan maupun bagi hasil pajak propinsi sering terlambat diperoleh, sehingga penetapan target pada APBD belum semuanya mencerminkan besaran sesuai dengan peraturan yang menetapkannya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu menempuh berbagai upaya untuk memecahkan masalah yang ada sehingga permasalahan yang ada dapat teratasi. Beberapa kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- a. Melakukan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi agar pendapatan daerah khususnya yang

bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dapat terealisasi secara tepat waktu dan dengan nominal sesuai target yang sudah ditetapkan bahkan melampaui target.

- b. Melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala atau rutin terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat internal maupun pengawasan yang bersifat eksternal. Melalui upaya ini diharapkan tidak terjadi penyimpangan atau kebocoran dalam pengelolaan PAD dan para petugas atau aparat pengelola PAD akan lebih termotivasi dalam bekerja.
- c. Melakukan penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak/wajib retribusi melalui pertemuan/rapat, spanduk, media cetak maupun melalui papan reklame untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak/wajib retribusi daerah sehingga mereka akan lebih patuh atau taat dalam membayar kewajibannya.
- d. Memberikan penghargaan kepada perusahaan/lembaga atau perseorangan yang memiliki kesadaran tinggi dalam membayar pajak dan juga memberikan penghargaan kepada institusi atau petugas yang berprestasi dalam memungut pajak/retribusi daerah. Melalui upaya ini diharapkan para wajib pajak akan termotivasi dalam membayar kewajibannya begitu pula kepada petugas pemungut pajak/retribusi diharapkan dapat meningkatkan motivasinya dalam bekerja.
- e. Meningkatkan sarana mobilitas sehingga operasional penagihan pajak/retribusi daerah dapat berjalan lancar. Dengan adanya dukungan sarana mobilitas yang memadai diharapkan pemungutan pajak/retribusi daerah dapat terlaksana secara intensif.
- f. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap obyek dan subyek pajak yang baru sehingga jumlah obyek dan subyek pajak akan meningkat.
- g. Melakukan penilaian atau uji petik terhadap obyek pajak sehingga diperoleh target yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui kegiatan ini diharapkan target obyek pajak akan bisa meningkat.
- h. Melakukan revisi terhadap beberapa peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga diharapkan target penerimaan Daerah dapat meningkat.
- i. Membangun dan merehabilitasi infrastruktur seperti pasar, rumah sakit dan lainnya sehingga akan menambah dan meningkatkan sumber dan target Pendapatan Asli Daerah dari jenis Retribusi Daerah.

Permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bahwa kondisi riil beban Belanja Daerah masih didominasi oleh besarnya alokasi Belanja Pegawai (Belanja

Aparatur), sehingga alokasi belanja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara efisien dan efektifitas mulai dari Perencanaan (Planning), Pelaksanaan (Actuating), Pengorganisasian (Organizing) hingga pengawasan (Controlling) sesuai dengan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing dinas satuan kerja. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah menjadi tidak bermakna. Salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan adalah Pendapatan Asli Daerah.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2018 diarahkan untuk mendukung pencapaian target tahun kedua RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2016.

Pembangunan tahun 2018 di fokuskan pada pencapaian target tahun kedua RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016–2021. Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal
2. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial
3. Penguatan struktur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam
4. Peningkatan kualitas infrastruktur Kabupaten dan Penataan Wilayah Perkotaan Praya
5. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik.

Untuk mendukung Pencapaian fokus pembangunan di atas, arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2018 adalah :

1. Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat.
2. Mengalokasikan belanja daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi NTB dalam kerangka Otonomi Daerah Negara kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah
4. Menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.

5. Mengalokasikan belanja pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.

1. Kebijakan Belanja Daerah

Adapun kebijakan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2018, meliputi :

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan kelompok belanja yang penganggarnya tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja ini terbagi kedalam beberapa jenis belanja, antara lain : belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Penyediaan belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNSD, pembayaran gaji Kepala Daerah, Penghasilan DPRD, dengan tetap menyediakan akses sebesar 2,5 persen dalam rangka mengantisipasi adanya kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga dan antisipasi mutasi pegawai.

Terhadap belanja subsidi di Tahun Anggaran 2018 tidak menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah daerah sehingga tidak disediakan anggarannya.

Kebijakan belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Penetapan besaran hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan Belanja Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Mekanisme penganggaran bantuan sosial ditempuh melalui proses evaluasi oleh SKPD untuk selanjutnya mendapat rekomendasi Kepala Daerah melalui TAPD.

Kebijakan penganggaran belanja Bagi Hasil diarahkan untuk penganggaran bagi hasil pajak dan retribusi yang dicapai daerah pada tahun anggaran berkenaan untuk desa maupun kelurahan se-Kabupaten Lombok

Tengah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan penganggaran Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dengan yang diprioritaskan untuk penyediaan serta peningkatan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), penyediaan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dan Tunjangan Kepala Dusun serta pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yaitu bantuan untuk penyelenggaraan Pilkades, bantuan keuangan untuk tenaga ketentraman dan keterbiban umum yang ditempatkan di desa/kelurahan. Terdapat pula bantuan keuangan bersifat khusus untuk peningkatan kesejahteraan pengurus rumah ibadah melalui penyediaan honorarium untuk Marbot Masjid atau peribadatan lainnya dan dukungan operasional. Sedangkan untuk bantuan keuangan kepada 13 Partai Politik dianggarkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan penganggaran belanja tidak terduga pada APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluarkendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat.

b. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan kelompok belanja yang penganggarnya terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari SKPD berdasarkan landasan hukum pembentukannya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, harus dapat mencerminkan adanya tingkat besaran fungsi-fungsi yang dilaksanakan (*money follow function*).

Kebijakan penganggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada 44 OPD berdasarkan pembagian urusan dan unit organisasi. Alokasi berdasarkan urusan dan unit organisasi tersebut terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar oleh 9 OPD, urusan wajib bukan pelayanan dasar dilaksanakan oleh 12 OPD, urusan pilihan pada 4 OPD dan Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh 19 OPD.

Selanjutnya kebijakan penganggaran Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 terdapat penambahan plafon. Beberapa hal yang mendasari penambahan plafon ini, antara lain antara lain bersumber dari SiLPA 2017 yang perlu dialokasikan yaitu, pengalokasian SiLPA DAK Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2017, SiLPA BLUD RSUD Praya Tahun Anggaran 2017, kapitasi, retensi, penyelesaian kegiatan yang belum rampung pada Tahun Anggaran 2017, pengalokasian belanja tambahan target pendapatan baru (Dana BOS dan Pendapatan UPTD Unit Transfusi Daerah. Adanya tambahan target Pendapatan Asli Daerah 2018 dan tambahan target pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang bersumber dari alokasi kurang bayar beberapa objek pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari pemerintah pusat serta tambahan target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diarahkan untuk penambahan anggaran Pembangunan Gedung Kantor Bupati, penambahan anggaran untuk pembebasan lahan Pasar Jelojok, penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan Biao, penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan sarana dan prasarana Gedung DPRD, penyediaan lahan untuk fasilitas kesehatan maupun pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit, obat-obatan di Rumah Sakit peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dan pemenuhan kebutuhan belanja insentif Guru Tidak Tetap (GTT) serta diarahkan untuk menunjang Program/Kegiatan berdasarkan skala Prioritas dan tersebar di beberapa SKPD.

2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Adapun penganggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.180.147.657.905,96 dengan realisasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp2.033.415.179.494,27 atau sebesar 93,27 %.

Selanjutnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2018 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 31.
Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	ANGGARANSETELAH PERUBAHAN(Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
5.	BELANJA DAERAH	2.180.147.657.905,96	2.033.415.179.494,27	93,27
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.171.793.722.570,96	1.135.382.675.948,00	96,89
5.1.1.	Belanja Pegawai	838.203.926.002,61	811.655.077.049,00	96,83
5.1.3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Belanja Hibah	44.643.000.000,00	44.131.958.500,00	98,86
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	13.639.640.846,00	7.523.589.830,00	55,16
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9.037.275.622,35	6.319.638.432,00	69,93
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	264.769.880.100,00	264.754.910.137,00	99,99
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	997.502.000,00	66,50
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.008.353.935.335,00	898.032.503.546,27	89,06
5.2.1.	Belanja Pegawai	62.070.824.500,00	60.140.330.800,00	96,89
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.168.206.655,46	478.295.866.838,27	95,63
5.2.3.	Belanja Modal	446.114.904.179,54	359.596.305.908,00	80,61
	JUMLAH BELANJA	2.180.147.657.905,96	2.033.415.179.494,27	93,27

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing belanja daerah pada Tahun Anggaran 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp838.203.926.002,61 dan direalisasikan sebesar Rp811.655.077.049,00atau 96,83%.Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 32.

Realisasi Belanja PegawaiTidak Langsung
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	772.685.788.191,43	753.036.378.816,00	97,46
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	53.645.900.000,00	48.133.996.800,00	89,73
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	7.353.600.000,00	7.110.000.000,00	96,69
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.371.196.862,73	2.941.660.402,00	87,26
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.147.440.948,45	433.041.031,00	37,74
	JUMLAH	838.203.926.002,61	811.655.077.049,00	96,83

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Belanja Bunga

Tahun anggaran 2018 tidak terdapat belanja bunga karena tidak ada piinjaman daerah.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 merupakan hibah yang diberikan kepada Badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan adalah sebesar Rp43.743.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.43.631.958.500,00 atau 99,75%.Selain itu terdapat hibah kepada Instansi Vertikal yakni POLRES Lombok Tengah dalam rangka pengamanan pemilihan Kepala Desadengan anggaran sebesar Rp900.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp500.000.000,00 atau 55,56%.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Sosial pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp13.639.640.846,00 dibelanjakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial berupa pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat Non Quota yang realisasi mencapai Rp612.927.708,00 atau 58,45%, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya yang realisasi mencapai Rp3.270.000.000,00 atau 99,85%, Bantuan tali asih pada korban kebakaran pasar Renteng dan biaya relokasi di Desa Beber yang realisasi mencapai Rp1.420.000.000,00 atau 94,67% dan pembayaran dana kesehatan yang realisasinya mencapai Rp2.220.662.122,00 atau 28,41%.

5) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa

Rencana anggaran belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa Tahun 2018 adalah sebesar Rp9.037.275.622,35 dan terealisasi sebesar Rp6.319.638.432,00 atau 69,93%. Lebih rinci rencana anggaran dan realisasi bagi hasil kepada Pemerintah Desa sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 33
Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	6.742.393.725,45	5.419.891.413,00	80,39
5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.294.881.896,90	899.747.019,00	39,21
	JUMLAH	9.037.275.622,35	6.319.638.432,00	69,93

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik

Rencana anggaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik adalah sebesar Rp264.769.880.100,00 dan terealisasi sebesar Rp264.754.910.137,00 atau 99,99%. Lebih rinci rencana anggaran dan realisasi belanja Bantuan ke Desa dan Partai Politik sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 34
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada
Desa dan Partai Politik Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	263.969.880.100,00	263.969.872.601,00	100,00
5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	800.000.000,00	785.037.536,00	98,13
	JUMLAH	264.769.880.100,00	264.754.910.137,00	99,99

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp997.502.000,00 atau 66,50%. Belanja Tidak Terduga ini digunakan untuk penanggulangan bencana alam, banjir, dan angin puting beliung yaitu pembangunan jembatan Pemoles di Desa

Batujangkih, pembangunan Jembatan Desa Pengengat, pembangunan jembatan akibat tanah longsor di Dusun Embon Desa Mangkung dan penanggulangan bencana alam gempa bumi di kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Langsung pada pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp62.070.824.500,00 dan sebesar Rp.60.140.330.800,00 atau 96,89%. Selanjutnya secara lebih rinci belanja pegawai langsung sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 35
Realisasi Belanja PegawaiLangsung
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.025.131.500,00	27.466.543.800,00	94,63
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.545.380.000,00	12.127.009.000,00	96,67
5.2.1.04.	Honorarium Pengelola Dana BOS	13.582.320.000,00	14.084.044.000,00	103,69
5.2.1.05.	Belanja Pegawai BLUD	4.299.888.000,00	3.902.929.000,00	90,77
5.2.1.06.	Uang Piket	2.618.105.000,00	2.559.805.000,00	97,77
	JUMLAH	62.070.824.500,00	60.140.330.800,00	96,89

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp500.168.206.655,46 danterrealisasi sebesar Rp478.295.866.838,27 atau 95,63%. Selanjutnya secara lebih rinci belanja barang dan jasa sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 36
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.414.497.050,00	22.939.452.673,00	93,96
5.2.2.02.	Belanja Bahan Material	25.898.469.737,00	24.024.327.963,00	92,76
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	87.784.493.707,00	80.740.974.169,00	91,98
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	11.089.848.520,00	10.565.505.802,00	95,27
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.751.094.826,00	4.030.674.481,00	84,84
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.703.037.377,00	8.781.763.784,00	90,51

KODE 1	URAIAN 2	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) 3	REALISASI (Rp) 4	% 5
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang	3.063.053.000,00	2.590.485.000,00	84,57
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.070.495.000,00	1.005.444.500,00	93,92
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	200.000.000,00	199.600.000,00	99,80
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.908.162.000,00	1.504.410.000,00	78,84
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.142.077.137,00	29.814.795.852,00	89,96
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	626.460.000,00	617.460.000,00	98,56
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	661.325.000,00	630.424.000,00	95,33
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	502.450.000,00	472.950.000,00	94,13
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.429.777.620,00	35.544.093.318,00	92,49
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	232.690.000,00	232.690.000,00	100,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan dan Sosialisasi	4.644.993.000,00	4.202.180.000,00	90,47
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	370.979.000,00	362.256.000,00	97,65
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.231.862.000,00	2.197.403.700,00	98,46
5.2.2.22.	BelanjaBarang Dana BOS	58.856.720.000,00	61.443.364.000,00	104,39
5.2.2.23.	Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat	131.046.267.802,00	129.085.562.586,00	98,50
5.2.2.26.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.438.448.879,46	51.297.894.010,27	95,99
5.2.2.28.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.101.005.000,00	6.012.155.000,00	98,54
	JUMLAH	500.168.206.655,46	478.295.866.838,27	95,63

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

3) Belanja Modal

Belanja Modal pada pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp446.114.904.179,54 dan realisasi sebesar Rp359.596.305.908,00 atau 80,61%.Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja modalberdasarkan objek belanja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 37
Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2018

KODE 1	URAIAN 2	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) 3	REALISASI (Rp) 4	% 5
5.2.1.01.	Belanja Modal Tanah	11.061.369.654,00	9.645.981.855,00	87,20
5.2.1.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.095.611.137,54	44.290.865.834,00	94,04
5.2.1.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	278.463.123.229,00	203.607.254.995,00	73,12
5.2.1.05.	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	90.568.505.659,00	83.629.818.224,00	92,34
5.2.1.06.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.926.294.500,00	18.422.385.000,00	97,34
	JUMLAH	446.114.904.179,54	359.596.305.908,00	80,61

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA),

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan pinjaman kembali kepada PT. SMI senilai Rp79.959.000.000,00. Pinjaman ini rencananya akan digunakan untuk Pembangunan Pasar Jelojok.

Selanjutnya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, besaran penganggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA disesuaikan berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp99.371.454.716,79.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan penyertaan modal karena keterbatasan anggaran.

3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran untuk Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah. Adapun Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp110.626.287.216,79 atau 61,69% dari anggaran sebesar Rp179.330.454.716,79.

Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp110.626.287.216,79 atau 61,69% dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp179.330.454.716,79.

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 38
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	179.330.454.716,79	110.626.287.216,79	61,69
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	99.371.454.716,79	99.371.454.716,79	100,00
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	79.959.000.000,00	11.189.482.500,00	13,99
6.1.5.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		65.350.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	179.330.454.716,79	110.626.287.216,79	61,69

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Realisasi penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah baru mencapai senilai Rp11.189.482.500,00atau 13,99% yang digunakan untuk uang muka kerja Pembangunan Pasar Jelojoksedangkan penerimaan kembali investasi non permanen bersumber dari penerimaan kembali dana bergulir penguatan permodalan koperasi.

III.3. KINERJA LAINNYA

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini merupakan suatu keniscayaan. Pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Selain memberikan berbagai kemudahan dan efisiensi, penggunaan teknologi informasi ini juga disebabkan karena dimanika sosial kemasyarakatan yang sangat cepat. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah di daerah, penggunaan teknologi informasi harus dapat dilakukan pada seluruh SKPD baik secara terintegrasi atau tidak. Berikt beberapa aplikasi/ sistem informasi yang digunakan SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di daerah:

Tabel 3. 39
Rekapitulasi penggunaan aplikasi/ sistem informasi
lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

No	Aplikasi yang mempunyai fungsi	Daftar Aplikasi	Status (Keaktifan: Aktif/pasif)	Integrasi	Tidak Integrasi
1	DINAS PENDIDIKAN	1. DAPODIKDAS; 2. DAPODIKPAUDNI; 3. E-VERVAL SATUAN PENDIDIKAN, VERIFIKASI, VALIDASI PESERTA DIDIK.	AKTIF AKTIF AKTIF		
2	DINAS KESEHATAN	1. E-PUSKESMAS 2. E-BPJS; 3. SISMAL; 4. SIHA; 5. SITTKS (Keluarga Sehat)	AKTIF AKTIF AKTIF		
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	IPK ONLINE	AKTIF	YA	
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SISTEM ADMINISTRASI EKEPNDUDUKAN (SIAK)	AKTIF	YA	
5	DINAS KOMINIKASI DAN INFORMATIKA	SISTEM PPID	AKTIF AKTIF	TIDAK	TIDAK
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SISKEUDES	AKTIF	NTEGRASI TERHUBUNG KE DESA	
7	DINS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	SI PERPUSTAKAAN	AKTIF		TIDAK
8	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP	APLIKASI PERIZINAN	AKTIF	BELUM	
9	BAPPEDA	1. SIMDA (perencanaan) 2. ONLINE MONITORING SPAN; 3. SISMIOP.		INTEGRASI INTERNAL	
10	BPKAD	1. SIMDA; 2. SIMDA keuangan; 3. SIKD; 4. SIM Pengendalian dana transfer ke daerah dan indikasi kebutuhan daerah; 5. Online Monitoring SPAN; 6. SILAK; 7. SOLAH; 8. SOISMIOP		INTEGRASI INTERNAL	
11	BKPP	1. SI-DAWAI; 2. E-SMART; 3. SI-SENSI	AKTIF AKTIF AKTIF	INTEGRASI INTERNAL LINGKUP BKPP	
12	SEKRETARIAT DAERAH	1. E-DISPOSISI; 2. JDIH; 3. E-MONEV APBD; 4. E-REPORTING SPSE; 5. E-MALA LPSE; 6. BLOG TIM LPSE		INTEGRASI INTERNAL	

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

A.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Tujuan Strategis
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis pembangunan seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 kami paparkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN			KRITERIA CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA CAPAIAN TUJUAN
1	Meningkatnya kondusifitas investasi	1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	111%	SANGAT BAIK	111%	SANGAT BAIK
2	Meningkatnya efektifitas pemberdayaan PMKS	2	Terbinanya PMKS secara berkelanjutan	108%	SANGAT BAIK	108%	SANGAT BAIK
3	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanaman nilai kearifan lokal	3	Terwujudnya metode penanaman nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang efektif	100%	BAIK	100%	BAIK
4	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	4	Terwujudnya sistem layanan kesehatan yang baik	100%	BAIK	100%	BAIK
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan	5	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memadai	114%	SANGAT BAIK	114%	SANGAT BAIK
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja	6	Tersedianya lapangan pekerjaan baru	147%	SANGAT BAIK	147%	SANGAT BAIK
7	Meningkatnya konektifitas pembangunan antar wilayah	7	Tersedianya jalan dalam kondisi yang mantap	98%	BAIK	116%	SANGAT BAIK
		8	Tersedianya sarana dan prasarana utilitas perkotaan	133%	SANGAT BAIK		

TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN			KRITERIA CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA CAPAIAN TUJUAN
8	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	9	Menurunnya luasan kawasan kumuh	123%	SANGAT BAIK	123%	SANGAT BAIK
9	Mencegah semakin menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	10	Tercegah semakin menurunnya daya dukung lingkungan	87%	BAIK	87%	BAIK
10	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	11	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan	110%	SANGAT BAIK	110%	SANGAT BAIK
11	Meningkatnya efektifitas pembangunan Keluarga Berencana	12	Terwujudnya pengendalian jumlah penduduk	92%	BAIK	99%	BAIK
		13	Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan pertama	96%	BAIK		
12	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	14	Terwujudnya koperasi yang berkualitas	102%	SANGAT BAIK	103%	SANGAT BAIK
		15	Tersedianya SDM UMKM dan aparatur yang berkompeten	101%	SANGAT BAIK		
13	Meningkatnya produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan untuk menuju swasembada pangan	16	Tersedianya teknologi pertanian	108%	SANGAT BAIK	108%	SANGAT BAIK
14	Meningkatnya stabilitas ketahanan pangan	17	Terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam	99%	BAIK	99%	BAIK
15	Meningkatnya aminitas (kenyamanan) dan sekuiritas (keamanan) wisatawan	18	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai	103%	SANGAT BAIK	103%	SANGAT BAIK
16	Meningkatnya produktifitas perikanan dan hasil olahan perikanan	19	Terwujudnya peningkatan produksi perikanan	228%	SANGAT BAIK	228%	SANGAT BAIK
17	Meningkatnya Produktifitas dan kualitas hasil Industri Kecil Menengah	20	Tersedianya sarana prasarana IKM yang memadai	135%	SANGAT BAIK	135%	SANGAT BAIK
18	Meningkatkan kapasitas pemda dalam pelayanan publik	21	Terwujudnya kapasitas keuangan daerah yang memadai	105%	SANGAT BAIK	105%	SANGAT BAIK
Rata-rata total				114 %	SANGAT BAIK	116 %	SANGAT BAIK

A.2. Kesimpulan Umum

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKj-IP) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018, dengan tujuan menyampaikan tingkat kualitas dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 21 (Dua puluh satu) sasaran strategis dan 18 (Delapan Belas) tujuan strategis. Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sasaran kumulatif adalah sebesar 114 %. Sementara itu, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tujuan kumulatif adalah sebesar 116%. Adapun rekapitulasi capaian kinerja, baik berdasarkan capaian kinerja kumulatif sasaran maupun kumulatif tujuan, mampu mencapai besaran angka 115 %. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 adalah:

1. Belum dilakukannya reviu terhadap dokumen-dokumen perencanaan dalam rangka harmonisasi / sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan. Reviu dokumen perencanaan merupakan salah satu rekomendasi dalam LHE SAKIP tahun-tahun sebelumnya, namun baru terealisasi pada akhir tahun 2018. Kondisi ini mengakibatkan penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program kegiatan masih menggunakan dokumen perencanaan yang lama;
2. Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data kinerja belum dilaksanakan dengan optimal. Contoh belum semua SKPD memiliki profil atau statistik sektoral sesuai dengan Tupoksi yang dimiliki;
3. Kurangnya pemahaman aparatur tentang SAKIP, kurangnya sosialisasi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Permen PAN dan RB No 59 Tahun 2014;
4. Kurangnya kedisiplinan OPD dalam menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan secara tepat waktu.

B. Saran-Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan minimal, dan standar operasional prosedur pada setiap SKPD dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelaksanaan tugas;
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu membangun sistem informasi dalam penyelenggaraan perencanaan, keuangan, kepegawaian, monitoring dan evaluasi, palaporan dan SAKIP ;
3. Perlu dilaksanakan reviu terhadap dokumen-dokumen perencanaan lingkup kabupaten dan SKPD;
4. Tiap-tiap OPD perlu menyusun profil OPD yang terutama memuat data-data statistik sektoral yang berkaitan dengan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki;
5. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif;
6. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin tentang penyelenggaraan SAKIP dan pengumpulan data kinerja SKPD.

LAMPIRAN